

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2009

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010

Daftar Tabel

		halaman
Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta	8
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur Tahun 2009	9
Tabel 1.3	Presentase Penduduk Yang Bekerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2009	10
Tabel 1.4	Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Jakarta Tahun 2009 (10 tahun ke atas)	11
Tabel 1.5	Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut 5 Negara Tujuan Utama Tahun 2008 - 2009	12
Tabel 1.6	Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut 5 Komoditi Utama Tahun 2008 - 2009	13
Tabel 1.7	Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut 5 Negara Tujuan Utama Tahun 2008 - 2009	14
Tabel 1.8	Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut 5 Komoditi Utama Tahun 2008 – 2009	15
Tabel 1.9	PDRB Tahun 2009 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000	19
Tabel 1.10	Laju Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2008 – 2009 (persentase)	20
Tabel 1.11	Inflasi DKI Jakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008 – 2009	21
Tabel 1.12	Inflasi Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008 – 2009	21
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009	5
Tabel 3.2	Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009	6
Tabel 3.3	Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2009	7
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009	13
Tabel 6.1	Bantuan Keuangan Kepada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur Tahun 2003-2009	2
Tabel 6.2	Program Sister City DKI Jakarta dengan Kota Lain	3

Daftar Grafik

halaman

Grafik 1	Maksud Utama Kunjungan Wisman ke DKI Jakarta (%)	15
----------	--	----

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Dasar Hukum LKPJ Gubernur Tahunan.....	1
	B. Dasar Hukum Pembentukan Provinsi DKI Jakarta.....	2
	1. Sejarah Kota Jakarta	2
	2. Dasar Hukum Pemprov DKI Jakarta	6
	C. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta.....	7
	1. Kondisi Geografis.....	7
	a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah	7
	b. Iklim	8
	c. Geologi	8
	2. Kondisi Demografis.....	9
	3. Kondisi Ekonomi.....	11
	a. Potensi Unggulan Daerah	11
	b. Pertumbuhan Ekonomi	17
	c. Inflasi	20
BAB II	KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
	A. Visi dan Misi	1
	1. Visi	1
	2. Misi	1
	B. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja	
	Pembangunan Daerah.....	4
	1. Indeks Pembangunan Manusia	4
	2. Struktur Ekonomi	5

3. Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral.....	6
4. Laju Inflasi	7
5. PDRB Per Kapita	8
6. Koefisien Gini	8
7. Investasi	8
8. Jumlah Penduduk	9
9. Jumlah Keluarga Miskin	9
10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9
11. Angka Melek Huruf	10
12. Angka Partisipasi Sekolah	10
13. Tingkat Pendidikan	11
C. Program Didecated	11
D. Program APBD 2009	12
 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ...	1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	2
1. Kebijakan Pendapatan Daerah.....	2
2. Realisasi Pendapatan Daerah	4
3. Permasalahan dan Solusi.....	7
B. Pengelolaan Belanja Daerah	10
1. Kebijakan Belanja Daerah	10
2. Realisasi Belanja Daerah.....	12
3. Permasalahan dan Solusi.....	14
D. Pengelolaan Pembiayaan Daerah.....	18
1. Kebijakan Pembiayaan Daerah	18
2. Realisasi Pembiayaan Daerah.....	19
E. Dana Cadangan Daerah (DCD)	20

BAB IV	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
A.	Program Dedicated.....	1
B.	Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan Wajib...	6
1.	Urusan Pendidikan	6
2.	Urusan Kesehatan	10
3.	Urusan Pekerjaan Umum	13
4.	Urusan Perumahan Rakyat	18
5.	Urusan Penataan Ruang	18
6.	Urusan Perencanaan Pembangunan	20
7.	Urusan Perhubungan	22
8.	Urusan Lingkungan Hidup.....	24
9.	Urusan Pertanahan.....	28
10.	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	29
11.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32
12.	Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)	33
13.	Urusan Sosial	37
14.	Urusan Ketenagakerjaan	41
15.	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	43
16.	Urusan Penanaman Modal	45
17.	Urusan Kebudayaan	48
18.	Urusan Pemuda dan Olahraga	50
19.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	52
20.	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	55
21.	Urusan Ketahanan Pangan	64
22.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66

23. Urusan Statistik.....	68
24. Urusan Kearsipan	24
25. Urusan Komunikasi dan Informatika	70
26. Urusan Perpustakaan	71
C. Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan Pilihan	72
1. Urusan Pariwisata	72
2. Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan	74
3. Urusan Perdagangan	78
 BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	 1
A. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Kementrian Kelautan dan Perikanan.....	1
B. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	2
C. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Kementrian Sosial.....	3
 BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	 1
A. Kerjasama Antar Daerah/Kota.....	1
1. Kerja sama DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Bodetabekjur)	1
2. Kerja sama Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi se Jawa-Bali	2
3. Kerja Sama Luar Negeri	2
4. Kerjasama teknik dan jasa ekonomi luar negeri.....	4
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	5
1. Kerjasama di Bidang Keindahan Kota.....	6
2. Kerjasama Pemanfaatan Asset.....	6
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	6

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	7
1. Kebakaran.....	7
2. Banjir.....	8
BAB VII PENUTUP	1
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahunan.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dijadwalkan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur yang akan disampaikan ke DPRD untuk dibahas secara internal oleh DPRD. Hasil pembahasan ditetapkan menjadi keputusan DPRD yang bersifat rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

Untuk LKPJ 2009 ini disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

- kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pakar-Pakar Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009.

LKPJ Gubernur Tahun 2009 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Kebijakan Pemerintahan Daerah |
| BAB III | Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah |
| BAB IV | Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| BAB V | Penyelenggaraan Tugas Pembantuan |
| BAB VI | Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan |
| BAB VII | Penutup. |

B. Dasar Hukum Pembentukan Provinsi DKI Jakarta

1. Sejarah Kota Jakarta

Pada tahun 1527, berkembang sebuah kawasan perdagangan antar pulau yang terletak di muara sungai Ciliwung dengan inti sebuah pelabuhan laut yang dikenal sebagai Bandar Sunda Kelapa.

Pada tanggal 22 Juni 1527 Faletehan sebagai penguasa wilayah Bandar Sunda Kelapa, mengganti Sunda Kelapa menjadi fathan mubina atau Jayakarta yang artinya kemenangan akhir.

Kota pelabuhan Jayakarta menarik banyak pendatang asing dari Eropa, Cina dan Arab terutama pedagang dari negeri Belanda (VOC), yang menetap di Jayakarta.

Pada tahun 1611 VOC mendapat izin untuk membangun kompleks perkantoran, gudang dan tempat tinggal orang Belanda, yang berlokasi di dekat muara tepi bagian timur Sungai Ciliwung. Kemudian di lokasi ini dibangun benteng sebagai pusat perdagangan VOC. VOC selanjutnya mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia.

Tanggal 4 Maret 1621, Pemerintah Belanda membentuk Stad Batavia dan VOC diberi kewenangan oleh Pemerintah Belanda untuk melaksanakan pemerintahan Stad Batavia tersebut.

Pada tahun 1799 karena merugi VOC dibubarkan, sehingga pemerintahan daerah-daerah yang selama itu dikuasai VOC diambil alih kembali oleh Pemerintah Belanda. Sejak saat itu Pemerintah Belanda menjadikan daerah-daerah bekas VOC sebagai daerah otonomi yang dinamakan Hindia Belanda di bawah pimpinan seorang Gubernur Jenderal.

Pada tanggal 1 April 1905, Stad Batavia diubah menjadi *Gemeente Batavia*, yang diberi kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda.

Gemeente Batavia merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah *Gemeente Batavia* kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu). Wilayah Karesidenan (Stad) Batavia dibagi menjadi 5 (lima) wilayah yang lebih kecil, yang disebut “*afdeling*” (kabupaten/kota), yaitu (1) *Afdeling Batavia* (kota dan pinggiran kota Batavia), (2) *Afdeling Meester Cornelis* (sekarang Jatinegara), (3) *Afdeling Tangerang* (4) *Afdeling Buitenzorg* (Bogor) dan (5) *Afdeling Karawang*.

Tahun 1908, wilayah *Afdeling* Batavia dibagi menjadi 2 Distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden, yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (onderdistrik). Distrik Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen dan Tanah Abang.

Pada tahun 1922 keluar Undang-Undang (UU) tentang Pembaharuan Pemerintahan, diikuti terbitnya UU Propinsi, UU Kabupaten (Regentschap, 1924) dan UU Kota (Stadsgemeente, 1926).

Selanjutnya “Gemeente Batavia” ditetapkan menjadi Pemerintahan Kota (Stadsgemeente Batavia).

UU Pemerintahan Kota (Stadsgemeente) tahun 1926 menetapkan sistem pemerintahan Kota (stadsgemeente) yang terdiri dari: (1) DPRD (Raad); (2) DPD (College van Burgemeester en Wethouders) dan (3) Walikota (Burgemeester).

Pada tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan balatentara Jepang, tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintah Jepang mengeluarkan UU Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (Syuu). Keresidenan (Syuu) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (Ken) dan Kota (Shi).

Kalau *stadsgemeente* hanya merupakan badan yang mengurus rumah tangganya saja, tanpa melaksanakan urusan kepamongprajaan, maka menurut UU Tata Pemerintahan Daerah masa Pemerintahan Jepang, “shi” (stadsgemeente) mengerjakan semua urusan pemerintahan, termasuk kepamongprajaan dalam lingkup wilayahnya. Urusan pemerintahan (pamongpraja) di dalam ‘stadsgemeente’ yang sebelumnya diurus oleh Regent (Bupati), Wedana, Asisten-Wedana, Kepala Kampung atau Wijkmeester, sekarang diurus dan merupakan kewenangan “Shichoo” (Walikota). Mereka itu mejadi pegawai shi dan menjalankan urusan pemerintahan shi di bawah pemerintahan dan pimpinan “shichoo”.

Selanjutnya menurut Undang-Undang tersebut, “Gunseikan” (Kepala Pemerintahan Militer Jepang) dapat membentuk pemerintahan kota khusus (tokubetsu shi). Beda pemerintahan kota khusus (tokubetsu shi) dengan pemerintahan kota (Shi), adalah bahwa pemerintahan kota khusus (tokubetsu shi) tidak di bawah Keresidenan (syuu), melainkan langsung di bawah Pemerintahan Militer Jepang (gunseikan). Jakarta adalah pemerintahan kota khusus (Jakarta Tokubetsu Shi) yang dipimpin oleh walikota khusus (tokubetsu Shichoo). Ini berarti kedudukan Jakarta meningkat dari kota (Shi) menjadi kota khusus (Tokubetsu Shi).

Walikota khusus Jakarta (tokubetsu Shichoo) dibantu oleh beberapa pegawai tinggi (Zyoyaku). Walikota dan pegawai tinggi diangkat oleh Pemerintahan Militer Jepang (Gunseikan).

Selama pemerintahan militer Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi) di Indonesia. Walikota pertama kota khusus Jakarta adalah Tsukamoto dan yang terakhir adalah Hasegawa. Setelah kemerdekaan, dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah (1) Soewiryo, 1945-1951, (2) Syamsuridjal, 1951-1953 dan (3) Soediro, 1953-1960.

Pada tanggal 15 Januari 1960 kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur.

Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964), terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya.

Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966), terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.

Pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977), sebutan Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta, dengan

Gubernurnya yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992).

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto, terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2008) terbit UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berubah.

2. Dasar Hukum Pemprov DKI Jakarta

Adapun dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

C. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

1. Kondisi Geografis

a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Jakarta di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebelah barat dengan Provinsi Banten. Di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 sungai dan 2 kanal.

Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi $6^{\circ} 12'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 48''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan $661,52 \text{ km}^2$ dan berupa lautan $6.977,5 \text{ km}^2$. Wilayah DKI Jakarta memiliki sekitar 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Ketinggian maksimum Kota Jakarta 7 meter di atas permukaan laut, sedangkan sebagian wilayah khususnya di sekitar pantai laut Jawa terdapat beberapa tempat yang berada di bawah permukaan air laut pasang sehingga rawan genangan.

Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, yakni kota Jakarta Selatan dengan luas daratan $145,73 \text{ km}^2$, Jakarta Timur dengan luas daratan $187,73 \text{ km}^2$, Jakarta Pusat dengan luas daratan $47,90 \text{ km}^2$, Jakarta Barat dengan luas daratan $126,15 \text{ km}^2$ dan Jakarta Utara dengan luas daratan $142,40 \text{ km}^2$, serta Kabupaten Administrasi dengan luas daratan $11,81 \text{ km}^2$. Pembagian wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Pembagian wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta

No	Kota / Kabupaten Administrasi	Jumlah			
		Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	Jakarta Pusat	8	44	393	4.669
2	Jakarta Utara	6	31	414	4.823
3	Jakarta Timur	10	65	696	7.794
4	Jakarta Selatan	10	65	578	6.122
5	Jakarta Barat	8	58	577	6.372
6	Kep. Seribu	2	4	24	119
Jumlah		44	267	2.682	29.899

Sumber : Biro Administrasi Wilayah Pemprov DKI Jakarta Tahun 2009

b. Iklim

Keadaan iklim kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 34,4° C pada siang hari dan suhu minimum berkisar 23,8° pada malam hari.

Sementara itu, curah hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2007, dengan tingkat kelembaban udara mencapai 62,0 – 97,0 persen dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m/detik.

c. Geologi

Seluruh daerah terdiri dari endapan Pleistocene terdapat ± 50 m di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial, sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10–25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8–15 m, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 m.

Dengan kondisi geografis seperti itu, Jakarta termasuk wilayah rawan banjir. Dalam siklus lima tahunan, Jakarta memiliki potensi banjir

cukup tinggi, terbukti pada bulan Februari tahun 2002 dan 2007 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula.

Jakarta merupakan kota yang terbentuk secara alami, sehingga penataan kota tidak dapat dilakukan secara optimal khususnya dalam sistem tata air/*drainase* dan jalan. Sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik atau dikuasai perorangan sehingga menyulitkan dalam penataan kota, karena memerlukan dana yang sangat besar untuk pembebasan lahan milik warga.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2009 sebanyak 9.223.000 jiwa, terdiri dari laki-laki 4.520.111 jiwa dan perempuan 4.702.889 jiwa, sebagian besar penduduk merupakan usia produktif (15-64 tahun) yaitu 72,85% sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur Tahun 2009

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 - 4	397.703	381.306	779.009
2	5 - 9	355.912	348.023	703.935
3	10 - 14	352.902	356.507	709.409
4	15 - 19	380.412	408.092	788.504
5	20 - 24	365.582	419.707	776.289
6	25 - 29	468.090	545.187	1.013.277
7	30 - 34	540.804	565.896	1106.700
8	35 - 39	449.488	445.489	894.977
9	40 - 44	336.506	337.312	673.818
10	45 - 49	260.002	266.396	526.398
11	50 - 54	207.316	209.891	417.207
12	55 - 59	158.408	154.412	312.820
13	60 - 64	107.114	102.108	209.222
14	65 - 69	68.771	69.874	138.645
15	70 - 74	42.409	46.878	89.287
16	75 +	37.692	45.811	83.503
Jumlah		4.520.111	4.702.889	9.223.000

Sumber : Hasil Proyeksi SUPAS Tahun 2009 BPS Provinsi DKI Jakarta

Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 4,12 juta orang, terdiri atas laki-laki 2,51 juta orang dan perempuan sebanyak 1,61 juta orang. Menurut lapangan pekerjaan, kegiatan ekonomi yang paling banyak menyerap pekerja adalah bidang perdagangan, restoran dan hotel (36,83%); kemudian jasa-jasa (24,52 %); dan industri pengolahan (16,22%). Dengan demikian, bidang jasa-jasa atau sektor tersier menyerap tenaga kerja sebanyak 77,57 persen.

**Tabel 1.3. Presentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas)
Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2009**

Lapangan Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	22.343	0,89	3.121	0,19	25.464	0,62
Pertambangan dan Penggalian	13.712	0,55	3.061	0,19	16.773	0,41
Industri	392.061	15,60	275.822	17,18	667.883	16,22
Listrik, Gas dan Air Minum	9.602	0,38	1.963	0,12	11.565	0,28
Konstruksi	175.763	6,99	15.229	0,95	190.992	4,64
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	853.131	33,95	663.805	41,34	1.516.936	36,83
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	343.461	13,67	57.424	3,58	400.885	9,73
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	185.510	7,38	92.468	5,76	277.978	6,75
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	517.120	20,58	492.794	30,69	1.009.914	24,52
Total	2.512.703	100,00	1.605.687	100,00	4.118.390	100,00

Sumber : Sakernas, BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009

Menurut tingkat pendidikan (khususnya bagi penduduk yang berusia 10 tahun ke atas) tercatat sebanyak 2.525.330 jiwa atau 35,10 persen dari penduduk yang berusia 10 tahun ke atas berhasil menyelesaikan pendidikan dari tingkatan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi mencapai 929.957 orang yang

terdiri atas sebanyak 323.336 orang pada level DI hingga DIII, dan sebanyak 606.621 orang atau sebesar 8,43 persen berpendidikan sarjana.

**Tabel 1.4. Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Jakarta Tahun 2009
(10 tahun ke atas)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	373.819	489.598	863.417
2	SD	635.949	826.186	1.462.135
3	SMTP	689.162	724.701	1.413.863
4	SMTA	1.374.140	1.151.190	2.525.330
5	Diploma I – III	151.563	171.773	323.336
6	Universitas	338.295	268.326	606.621
	Jumlah	3.562.928	3.631.774	7.194.702

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009

3. Kondisi ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Ekspor Melalui DKI Jakarta

Nilai ekspor melalui DKI Jakarta tahun 2009 sebesar US \$ 32.539,27 juta, atau turun 9,35 persen dari tahun 2008 yang mencapai US\$ 35.893,93 juta. Meskipun secara total ekspor tahun 2009 lebih rendah dari tahun 2008, namun kinerja ekspor bulanan menunjukkan arah peningkatan.

2) Ekspor Produk DKI Jakarta

Ekspor yang mempunyai pengaruh langsung terhadap perekonomian Jakarta adalah ekspor atas produk-produk yang dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2009, nilai ekspor barang produk Provinsi DKI Jakarta mencapai nilai US\$

7.536,44 juta, atau turun 19,77 persen dibanding tahun 2008 yang sebesar US\$ 9.393,32 juta.

Persentase ekspor produk DKI Jakarta terhadap ekspor yang melalui pelabuhan di Jakarta selama tahun 2007 hingga 2009 berkisar antara 23 hingga 26 persen. Hal ini dirasakan wajar mengingat Jakarta memiliki pelabuhan internasional sehingga barang yang dikirim tidak hanya berasal dari Jakarta saja.

Negara tujuan ekspor produk DKI Jakarta yang terbesar adalah Amerika Serikat, dengan nilai sebesar US\$ 996,03 juta (13,12 persen), tetapi bila dibandingkan tahun 2008 ekspor produk DKI Jakarta yang ke Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 21,99 persen, hal ini disebabkan salah satunya menurunnya permintaan dari negara tersebut akibat dampak langsung dari krisis ekonomi global yang sampai sekarang masih terjadi.

Sedangkan ekspor produk DKI Jakarta dengan negara tujuan China mengalami peningkatan sebesar 9,95 persen, dari US\$ 487,42 juta pada tahun 2008 menjadi US\$ 535,92 juta pada tahun 2009. Ini menunjukkan walaupun ekspor produk DKI Jakarta ke Amerika Serikat mengalami penurunan akan tetapi ekspor produk ke Negara-negara Asia masih berpotensi untuk ditingkatkan sehingga dapat tetap mendorong kinerja ekspor produk DKI Jakarta.

Tabel 1.5. Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut 5 Negara Tujuan Utama Tahun 2008 - 2009 (US\$ juta)

No	Negara	2008	2009	Pertumbuhan (%)
1	Amerika Serikat	1.276,87	996,03	- 21,99
2	Singapura	815,51	777,25	-4,69
3	China	487,42	535,92	9,95
4	Jepang	1.108,1	487,76	- 55,98
5	Malaysia	698,42	512,14	- 26,67
Lainnya		5.007,1	4.227,34	- 15,57
Total		9.393,32	7.536,44	- 19,77

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009

Jika ditinjau menurut komoditi, ekspor produk DKI Jakarta yang terbesar selama Tahun 2009 adalah kendaraan dan bagiannya yakni sebesar US\$ 872,09 juta atau sekitar 11,57 persen dari total ekspor produk DKI Jakarta. Tetapi bila dibandingkan tahun 2008, produk ini mengalami penurunan sebesar 40,62 persen dari US\$ 1.468,72 juta. Demikian pula dengan produk ekspor andalan lainnya seperti komoditi pakaian jadi bukan rajutan, yang menempati peringkat kedua, tahun 2009 nilainya turun 26,07 persen dan menempati peringkat ketiga. Krisis keuangan global memang sangat mempengaruhi permintaan pasar luar negeri, untuk itu diperlukan perluasan pasar domestik agar kinerja produk DKI Jakarta tetap dapat ditingkatkan, khususnya komoditi yang menjadi andalan DKI Jakarta.

Tabel 1.6. Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut 5 Komoditi Utama Tahun 2008 - 2009 (US \$ juta)

No	Komoditi	2008	2009	Pertumbuhan (%)
1	Kendaraan dan Bagiannya	1.468,7	872,09	-40,62
2	Perhiasan / Permata	858,9	834,85	-2,8
3	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	910,4	673,03	-26,07
4	Barang-barang Rajutan	622,6	529,50	-14,96
5	Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	711,9	546,74	-23,20
Lainnya		4.820,8	4.080,2	-15,36
Total		9.393,3	7.536,4	-19,77

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009

3). Impor

Selama tahun 2009, nilai impor melalui pelabuhan bongkar di DKI Jakarta mencapai US\$ 47.822,34 juta. Dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 63.312,74 maka terjadi penurunan impor sebesar 24,47 persen.

Pada tahun 2009, nilai impor DKI Jakarta terbesar berasal dari negara China yaitu US\$ 8.479,55 juta, tetapi bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya impor DKI Jakarta yang berasal dari negara China mengalami penurunan sebesar 10,93 persen. Sementara itu, impor dari Jepang yang selama tahun 2008 merupakan yang tertinggi, yakni sebesar US\$ 12.199,59 juta, pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 35,77 persen menjadi sebesar US\$ 7.836 juta.

Tabel 1.7. Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut 5 Negara Tujuan Utama Tahun 2008 - 2009 (US \$ juta)

No	Negara	2008	2009	Pertumbuhan (%)
1	China	9.519,83	8.479,55	-10,93
2	Jepang	12.199,59	7.835,84	-35,77
3	Amerika Serikat	4.359,37	4.365,66	0,14
4	Singapura	5.846,99	3.271,19	- 44,05
5	Thailand	5.147,55	3.491,70	- 32,17
Lainnya		26.239.41	20.378,39	- 22,34
Total		63.312.74	47.822,34	- 24,47

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009

Tinjauan terhadap komoditi menunjukkan nilai impor melalui pelabuhan DKI Jakarta terbesar pada tahun 2009 berasal dari produk mesin-mesin/pesawat mekanik dengan nilai sebesar US\$ 8.787 juta, tetapi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 yang sebesar US\$ 12.010,10 juta mengalami penurunan sebesar 26,83 persen.

Sedangkan untuk produk kapal terbang dan bagiannya mengalami kenaikan dari US\$ 1.853,39 juta pada tahun 2008 menjadi US\$ 3.185 juta pada tahun 2009 atau mengalami kenaikan sebesar 71,87 persen.

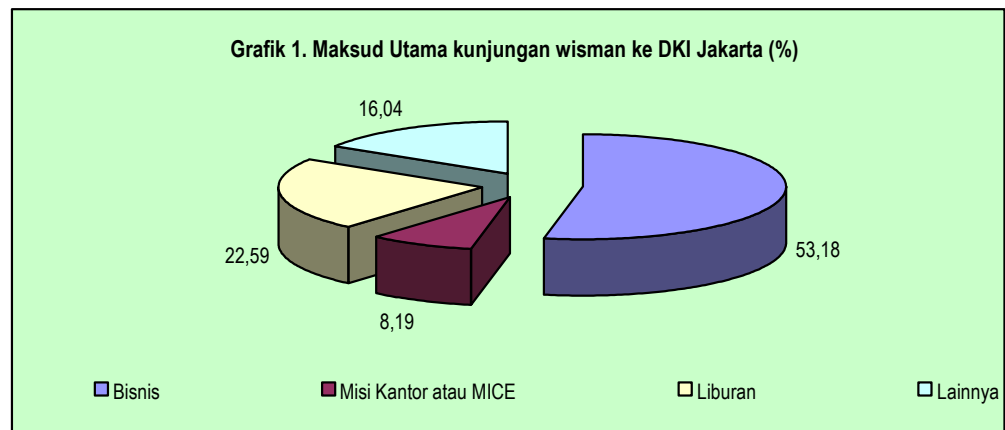
Tabel 1.8. Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut 5 Komoditi Utama Tahun 2008 – 2009 (juta US \$)

No	Komoditi	2008	2009	Pertumbuhan (%)
1	Mesin-Mesin / Pesawat Mekanik	12.010,10	8.787,70	- 26,83
2	Mesin / Peralatan Listrik	9.953,51	7.853,90	- 21,09
3	Kapal Terbang dan Bagiannya	1.853,39	3.185,36	71,87
4	Kendaraan dan Bagiannya	5.828,09	2.513,41	- 56,87
5	Besi dan Baja	4.596,52	2.510,22	- 45,39
Lainnya		29.071,12	22.971,75	- 20,98
Total		63.312,74	47.822,34	- 24,47

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009

Selain ekspor, potensi daerah juga dapat dilihat dari gambaran tingkat pariwisata khususnya dari wisatawan mancanegara.

Wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kota Jakarta melalui tiga pintu masuk (Soekarno-Hatta, Tanjung Priok, dan Halim Perdana Kusumah) selama tahun 2009 mencapai 1.451.914 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 5,38 persen dibandingkan kunjungan wisman tahun sebelumnya yang sebesar 1.534.432 kunjungan. Penurunan kunjungan wisman ke Kota Jakarta pada tahun 2009 lebih terkait dengan faktor eksternal. Adanya krisis finansial global yang melanda seluruh kawasan dunia telah menyebabkan kunjungan wisman ke DKI Jakarta mengalami sedikit penurunan. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa sebagian besar (53,18 persen) kunjungan wisman ke DKI Jakarta maksud utama kunjungannya adalah bisnis.



Selama tahun 2009, Wisman yang paling banyak mengunjungi Kota Jakarta adalah wisman yang berasal dari Malaysia sejumlah 244.797 kunjungan. Setelah itu diikuti oleh wisman dari Singapura (127.272 kunjungan); China (118.809 kunjungan); Jepang (81.205 kunjungan); Korea Selatan (59.168 kunjungan); Amerika Serikat (56.635 kunjungan); Australia (55.546 kunjungan); Belanda (50.004 kunjungan); Saudi Arabia (48.352 kunjungan); dan India (48.255 kunjungan). Secara total, kunjungan wisman dari sepuluh kebangsaan itu berjumlah 890.043 kunjungan, yang berarti mencapai 61,30 persen dari keseluruhan kunjungan ke Kota Jakarta. Ini menunjukkan bahwa kesepuluh negara itu memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi pasar utama kepariwisataan asing kota Jakarta.

Peristiwa BOM di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada pertengahan Juli 2009 hanya sedikit berpengaruh terhadap kunjungan wisman ke Kota Jakarta. Setelah peristiwa Bom (Agustus 2009), angka kunjungan wisman dari 10 kebangsaan utama mengalami penurunan kecuali untuk kebangsaan Singapura, China dan Australia yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 12,30 persen; 9,88 persen dan 5,93 persen. Namun demikian, pada bulan Oktober dan November, jumlah kunjungan wisman kembali menunjukkan *trend* yang meningkat. Peningkatan ini diharapkan akan terus berlanjut di waktu-waktu yang akan datang.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian DKI Jakarta dalam kurun dua tahun terakhir (2007-2009) menunjukkan prestasi yang cukup menggembirakan. Kondisi ini tergambar dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang mampu tumbuh di atas 5 persen dan di atas pertumbuhan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2007 sebesar 6,44 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2006 yang sebesar 5,95 persen. Hal ini disebabkan perekonomian pada tahun 2007 sudah dalam kondisi normal setelah pada tahun 2006 sedikit melambat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Kondisi yang sudah membaik di tahun 2007 relatif terjaga dan stabil sampai dengan tahun 2008. Meskipun sedikit melambat bila dibandingkan tahun 2007, pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang sebesar 6,18 merupakan prestasi yang menggembirakan karena di tahun 2008 (bulan Mei) Pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Selain itu krisis keuangan global yang berawal dari krisis keuangan sub-prime mortgage di Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya secara global pada akhir tahun 2008, sehingga Indonesia khususnya Jakarta juga tidak dapat terlepas dari dampaknya.

Krisis keuangan global masih dirasakan dampaknya hingga semester I/2009, perekonomian Jakarta hanya tumbuh sebesar 5,10 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir, namun demikian bila dibandingkan perekonomian dunia yang tumbuh negatif, pertumbuhan ekonomi Jakarta masih terjaga. Faktor utama melambatnya perekonomian Jakarta dalam satu tahun terakhir adalah kinerja ekspor yang menurun. Negara-negara yang selama ini menjadi tujuan utama ekspor barang Jakarta mengalami krisis keuangan, sehingga permintaan barang Jakarta mengalami penurunan. Akibatnya sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan produksi, yang selanjutnya mempengaruhi sektor perdagangan dan sektor pengangkutan sebagai muara semua hasil produksi.

Memasuki tahun 2009 Jakarta mengalami beberapa peristiwa yang cukup penting, diantaranya adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM jenis premium dan solar menjadi Rp 4.500,- per liter, terbakarnya Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, dan krisis sistem kelistrikan Jawa-Bali karena ketidakseimbangan antara cadangan daya dan pertumbuhan konsumsi listrik. Namun demikian, peristiwa-peristiwa tersebut tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian Jakarta, dampak akibat krisis keuangan global lebih mempengaruhi jalannya perekonomian Jakarta pada semester I/2009. Hal tersebut dibuktikan pada saat memasuki paruh kedua tahun 2009 perekonomian Jakarta kembali membaik yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2009. Meskipun krisis listrik belum terselesaikan secara optimal dan bahkan pada pertengahan Juli 2009 Jakarta sempat diguncang oleh ledakan bom di Hotel Ritz Carlton dan JW. Marriott perekonomian Jakarta mampu bergerak sedikit lebih cepat pada semester kedua tahun 2009. Sehingga, selama tahun 2009, perekonomian Jakarta tumbuh 5,01 persen.

Dari Sisi Produksi, semua sektor menunjukkan pertumbuhan positif, namun hanya sektor pengangkutan-komunikasi dan sektor jasa-jasa yang menunjukkan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan yang dicapai pada tahun 2008.

Sektor pengangkutan dan komunikasi masih menjadi sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2009, yaitu 15,63 persen. Pertumbuhan ini lebih cepat dari yang dicapai pada tahun 2008 yang sebesar 14,83 persen. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan pada sektor ini adalah kegiatan sub sektor komunikasi yang masih terus berkembang dengan menawarkan teknologi-teknologi baru di dunia komunikasi.

Demikian pula, dengan pertumbuhan sektor jasa-jasa yang sebesar 6,49 persen, lebih tinggi dari yang dicapai pada tahun 2008 yang sebesar 6,05 persen. Secara umum, peningkatan yang terjadi pada sektor ini didorong oleh pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2009. Penyelenggaraan pemilu telah mendorong kegiatan jasa swasta, baik menyangkut partai politik sebagai peserta, maupun jasa hiburan yang terkena multiplier efek akibat proses kampanye yang dilakukan peserta pemilu.

Sektor yang menunjukkan perlambatan namun masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik adalah sektor konstruksi. Setelah tumbuh sebesar 7,67 persen pada tahun 2008, pada tahun 2009 sektor ini tumbuh 6,20 persen. Puncak pekerjaan Banjir Kanal Timur (BKT) dan lanjutan program pembangunan apartemen bersubsidi serta rumah susun seribu tower menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan sektor ini.

Tabel 1.9. PDRB Tahun 2009 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)	
	2008	2009
Pertanian	0,77	0,34
Pertambangan dan penggalian	0,32	-4,34
Industri pengolahan	3,87	0,14
Listrik, gas, & air bersih	6,32	4,58
Konstruksi	7,67	6,20
Perdagangan, hotel dan restoran	6,66	4,01
Pengangkutan dan komunikasi	14,83	15,63
Keuangan, real estat & jasa perusahaan	4,21	3,97
Jasa-jasa	6,05	6,49
PDRB	6,22	5,01
PDRB Tanpa Migas	6,24	5,03

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009

Dari Sisi Pengeluaran, komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2009 adalah komponen konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 10,24 persen, atau lebih tinggi dari yang dicapai pada tahun 2008 yang sebesar 6,75 persen. Setelah itu disusul oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh

sebesar 6,15 persen. Selanjutnya, komponen PMTB tumbuh sebesar 2,76 persen, dan komponen ekspor tumbuh 3,97 persen. Sedangkan impor turun sebesar minus 1,85 persen.

Tabel 1.10. Laju Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta menurut komponen pengeluaran Tahun 2008 – 2009 (persentase)

Komponen Penggunaan	Laju Pertumbuhan	
	2008	2009
Konsumsi Rumah Tangga	7,47	6,15
Konsumsi Pemerintah	7,64	10,24
PMTB	8,49	2,76
Ekspor	4,60	0,24
Minus Impor	27,56	-1,85
PDRB	6,22	5,01

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

c. Inflasi

Indikator lain yang sangat penting dalam menentukan kondisi dan stabilitas perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi selain berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, juga tidak lepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata-niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peran kebijakan pemerintah di bidang moneter. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat secara rata-rata.

Inflasi DKI Jakarta selama tahun 2009 mencapai 2,34 persen jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya yang mencapai 11,11 persen. Rendahnya inflasi pada tahun 2009 tidak terlepas dari upaya pemerintah yang sangat ketat memperhatikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan masyarakat sehingga harga-harga relative terkendali. Disamping itu, pada tahun 2009 pemerintah juga tidak membuat kebijakan yang dapat mengganggu stabilitas harga.

**Tabel 1.11. Inflasi DKI Jakarta Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2008 - 2009**

No	Kelompok	Inflasi	
		2008	2009
1	Umum	11,11	2,34
2	Bahan Makanan	15,48	5,17
3	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	12,91	8,55
4	Perumahan	14,84	0,28
5	Sandang	8,56	5,31
6	Kesehatan	7,31	4,13
7	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	5,56	1,96
8	Transpor dan Komunikasi	6,20	-3,87
*) Sejak Juni 2008 menggunakan tahun dasar 2007 (2007=100), sebelumnya menggunakan tahun dasar 2002 (2002=100)			

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009

Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, tingkat inflasi di DKI Jakarta pada tahun 2009 lebih rendah. Inflasi nasional pada tahun 2009 sebesar 2,78 persen, sedangkan inflasi DKI Jakarta sebesar 2,34 persen.

**Tabel 1.12. Inflasi Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2008 - 2009**

No	Kelompok	Inflasi	
		2008	2009
1	Umum	11.06	2,78
2	Bahan makanan	16.35	3,88
3	Makanan jadi dan tembakau	12.53	7,81
4	Perumahan, air bersih, penerangan, dan bahan bakar	10.92	1,83
5	Pakaian	7.33	6,00
6	Kesehatan	7.96	3,89
7	Pendidikan dan rekreasi	6.66	3,89
8	Transport, komunikasi dan jasa keuangan	7.49	-3,67
*) Sejak Juni 2008 menggunakan tahun dasar 2007 (2007=100), sebelumnya menggunakan tahun dasar 2002 (2002=100)			

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Pembangunan 2007–2012 adalah:

”JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan damai.
2. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat, layak dan manusiawi.

Jakarta adalah sebuah kota yang bisa menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua, jika pemerintah dan masyarakatnya sepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci. Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, misi pembangunan 2007-2012 adalah sebagai berikut:

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah *Good Governance*;
2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima;

3. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan;
4. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

Makna misi yang dimaksud adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah "*Good Governance*", bermakna bahwa tata pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) prinsip *Good Governance*, yakni:
 - a. Partisipasi masyarakat
 - b. Tegaknya supremasi hukum
 - c. Transparansi
 - d. Kesetaraan
 - e. Daya tanggap kepada *stakeholders*
 - f. Berorientasi pada visi
 - g. Akuntabilitas
 - h. Pengawasan
 - i. Efektivitas dan efisiensi
 - j. Profesionalisme

Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui peningkatan kinerja aparatur, sistem dan unit kerja. Misi ini akan mewujudkan efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima, bermakna bahwa pelayanan prima dilakukan dengan mengutamakan norma pelayanan yakni: ramah, efisien, bermutu, cepat, transparan dan berkepastian hukum. Pelayanan prima terutama akan diprioritaskan

pada bidang-bidang yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat antara lain: pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keamanan, ketertiban, hukum, sarana dan prasarana kota, serta perhubungan dan transportasi.

3. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, bermakna bahwa pemberian otoritas dilandasi oleh pertimbangan bahwa di kalangan masyarakat telah ada komunitas keahlian tertentu yang berkemampuan untuk berpartisipasi secara luas dalam pembangunan. Pemberian otoritas telah dapat diimplementasikan pada bidang tertentu, sesuai dengan kemampuan masyarakatnya.

Lebih lanjut melalui pemberdayaan masyarakat ini, terbuka pula ruang publik untuk bermusyawarah, dan sekaligus merupakan proses pembelajaran kehidupan demokratis.

4. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, bermakna bahwa untuk menjamin kenyamanan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana kota terutama berkaitan dengan pengendalian banjir, kelancaran arus lalu lintas, penyediaan layanan air bersih, penyediaan ruang terbuka hijau skala kota dan taman interaktif.
5. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, bermakna bahwa Jakarta memiliki *"favorable climate"* untuk 7 (tujuh) aset kota, yakni:
 - a. *Human*
 - b. *Social*
 - c. *Cultural*
 - d. *Intellectual and Creative*
 - e. *Natural*

f. Environmental

g. Infrastructure

Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang serasi antar bidang dan wilayah. Kesejahteraan yang diarahkan adalah meningkatnya derajat kualitas kehidupan yang sinergis untuk ketujuh aset kota dimaksud.

B. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Hasil Evaluasi terhadap kinerja pembangunan tahun 2009 merupakan gambaran keberhasilan implementasi dari kebijakan tahun 2009. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga dimensi pembangunan manusia, yakni kesehatan yang diwakili Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan yang diwakili Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli diperoleh dari Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil. Dari ketiga komponen tersebut yang paling signifikan mempengaruhi IPM adalah rata-rata pengeluaran per kapita riil, diikuti rata-rata lama sekolah (pendidikan), dan Angka Harapan Hidup. Sejalan dengan meningkatnya kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perkembangan IPM DKI Jakarta selama periode 2006-2009 menunjukkan peningkatan, yakni dari 76,3 pada tahun 2006 meningkat menjadi 77,0 pada tahun 2008. Untuk tahun 2009 IPM DKI Jakarta diperkirakan naik menjadi 77,2.

Peningkatan pengeluaran riil per kapita penduduk merupakan dampak dari membaiknya ekonomi makro DKI Jakarta. Sedangkan kemajuan di bidang pendidikan, salah satunya disebabkan adanya program wajib

pendidikan dasar sembilan tahun. Harapan ke depan, wajib belajar bagi penduduk DKI Jakarta dapat ditingkatkan menjadi 12 tahun. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup penduduk DKI Jakarta meningkat seiring dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Secara nasional IPM DKI Jakarta selama periode 2006-2009 selalu berada di posisi teratas dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Jika diukur menurut skala internasional, posisi IPM DKI Jakarta berada dalam kategori menengah ke atas (66,00–79,99). Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang dilaksanakan di DKI Jakarta telah berhasil menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan.

2. Struktur Ekonomi

Perekonomian Jakarta yang digambarkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku secara nominal dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp 501,8 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 757,02 triliun pada tahun 2009. Dominasi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dalam perekonomian Jakarta belum tergoyahkan disamping sektor bangunan dan sektor jasa-jasa.

Sebagai tulang punggung perekonomian Jakarta, sektor jasa (tersier) memiliki peranan sebesar 71 persen bila dilihat dari kontribusinya pada PDRB. Pembentuk sektor *tersier* meliputi sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mempunyai kontribusi terhadap perekonomian daerah sekitar 20 persen; sektor jasa keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sekitar 28 persen; dan sisanya diberikan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa lainnya. Ini menunjukkan struktur perekonomian Jakarta sudah mengarah kepada struktur jasa (*service city*).

Penyumbang perekonomian Jakarta lainnya adalah sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 16 persen sedangkan sektor bangunan sebesar 11 persen. Sementara sumbangan sektor primer di

Jakarta hanya sebesar 0,5 persen yang terdiri dari sektor pertanian sebesar 0,1 persen dan sektor pertambangan sebesar 0,4 persen.

Dari sisi penggunaan, dalam kurun waktu 2005-2009 lebih dari 55 persen dari total PDRB digunakan untuk memenuhi permintaan dari luar Jakarta (ekspor ke provinsi lain dan luar negeri). Komponen penggunaan lainnya yang cukup besar adalah konsumsi rumah tangga sekitar 55 persen, impor barang dan jasa sebesar 53 persen serta pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar 35 persen. Selanjutnya, konsumsi pemerintah sebesar 6 persen dan konsumsi lembaga swasta sebesar satu persen.

3. Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral

Pertumbuhan ekonomi secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Jakarta) seperti: sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Sementara sektor bangunan dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan relatif cepat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Percepatan pertumbuhan sektor bangunan didorong juga oleh pembangunan fisik yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti pembangunan BKT, *fly over*, *under pass*, rumah susun dan pembangunan sarana busway, yang semuanya masuk ke dalam *dedicated program*. Demikian pula dengan pembangunan pusat-pusat bisnis dan pemukiman elit (apartemen atau kondominium) yang dilaksanakan oleh pihak swasta.

Sektor pengangkutan dan komunikasi selama lima tahun mengalami pertumbuhan fenomenal, yakni mampu tumbuh sekitar 14 persen per tahun. Maraknya penggunaan telepon seluler memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan sub sektor komunikasi.

Pada tahun 2009, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 15,6 persen, kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 6,5 persen, sektor bangunan sebesar 6,2 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 4,6 persen, sektor

perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 4,0 persen, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan 4,0 persen, sektor industri pengolahan sebesar 0,14 persen, sektor pertanian dengan pertumbuhan 0,3 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan sebesar minus 4,34 persen.

Sementara dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Jakarta secara dominan masih didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor barang dan jasa. Selama lima tahun terakhir, komponen konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan, demikian juga ekspor barang dan jasa.

Pada Tahun 2009 konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 10,2 persen, diikuti oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat 6,1 persen, pembentukan modal tetap bruto meningkat 2,8 persen, dan ekspor yang meningkat 0,2 persen. Sementara impor turun sebesar 1,8 persen.

4. Laju Inflasi

Selama empat tahun terakhir laju inflasi DKI Jakarta bila dibandingkan dengan inflasi nasional hampir selalu berada di bawah nasional, kecuali pada tahun 2008 sedikit lebih tinggi dari nasional. Sepanjang tahun 2009 DKI Jakarta tidak mengalami gejolak harga yang signifikan dan relatif stabil dengan tingkat inflasi tahunan hanya mencapai 2,34 persen. Bahkan sepanjang 10 tahun terakhir inflasi tahun 2009 merupakan yang terendah. Rendahnya inflasi pada tahun 2009 utamanya disebabkan oleh tingginya laju inflasi pada tahun 2008 yang mencapai 11,11 persen. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2009 pemerintah sangat memperhatikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan masyarakat sehingga harga-harga di DKI Jakarta relatif terkendali. Disamping itu pada saat yang bersamaan pemerintah juga tidak membuat kebijakan yang dapat mengganggu stabilitas harga.

5. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita sebagai gambaran tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah secara kasar. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama empat tahun mengalami kenaikan, yakni dari Rp 55,98 juta pada tahun 2006 menjadi Rp 82,08 juta pada tahun 2009. Jika dihitung rata-rata selama periode 2006-2009 pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku adalah sebesar 14 persen.

PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari PDRB Per kapita atas dasar harga konstan. Dalam periode 2006-2009 rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 5 persen.

6. Koefisien Gini

Koefisien Gini di DKI Jakarta selama periode 2006-2008 relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan perubahan distribusi pendapatan DKI Jakarta relatif tidak berubah, namun demikian, ketimpangan pendapatan yang terjadi di DKI Jakarta masih dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu 0,36 pada tahun 2006 dan 0,36 pada tahun 2008. Hal ini didukung pula oleh kriteria ketimpangan Bank Dunia, 40 persen penduduk berpendapatan rendah di DKI Jakarta menikmati lebih dari 17 persen total pendapatan. Ini mengindikasikan bahwa pembangunan di DKI Jakarta juga dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah.

Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan visi pembangunan DKI Jakarta. Kesejahteraan yang dinikmati oleh semua orang adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk miskin.

7. Investasi

Penanaman modal baik PMDN maupun PMA dalam kurun waktu 2006-2009 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Investasi yang ditanamkan oleh pemodal asing di DKI Jakarta mengalami kinerja terbaik

pada tahun 2008 dengan nilai investasi sebesar 9.625 juta dollar atau naik sekitar 58 persen dibandingkan nilai tahun sebelumnya. Namun kondisi tahun 2009 mengalami sebaliknya, krisis global menyebabkan nilai investasi yang ditanam pemodal asing sangat rendah.

8. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk pada tahun 2009 mencapai 9,22 juta, dengan demikian periode 2000-2009, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,11 persen per tahun. Pertambahan penduduk di DKI Jakarta berdampak pada meningkatnya kepadatan penduduk. Pada tahun 2006, kepadatan penduduk Jakarta mencapai 13.545 jiwa per km² dan meningkat menjadi 13.875 jiwa per km² pada tahun 2009.

9. Jumlah Keluarga Miskin

Jumlah Keluarga Miskin di DKI Jakarta periode 2006-2009 mengalami penurunan dari 4,6 persen pada tahun 2006 menjadi 3,62 persen pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 407,1 ribu jiwa menjadi 323,2 ribu jiwa. Penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari upaya pemerintah provinsi menempatkan masalah kemiskinan sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin mewujudkan Jakarta yang Nyaman dan Sejahtera untuk Semua.

10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan secara perlahan selama periode 2006-2009. Momentum pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan sekaligus menurunkan pengangguran terbuka. Dalam bulan Agustus 2007 – Agustus 2008, telah tercipta lapangan kerja baru bagi 349 ribu orang sehingga pengangguran terbuka menurun dari 12,57 persen

menjadi 12,16 persen. Pada tahun 2009, angka pengangguran sedikit menurun menjadi 12,15 persen.

Berdasarkan komposisi lapangan pekerjaan, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Kondisi tersebut juga mencerminkan perekonomian DKI Jakarta jika dikaitkan dengan kontribusi sektoral pembentukan PDRB.

11. Angka Melek Huruf

Secara umum Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 10 tahun ke atas di DKI Jakarta relatif stabil sepanjang tahun 2006-2009. Pada tahun 2006, AMH penduduk DKI Jakarta sebesar 98,34 persen dan pada tahun 2009 sebesar 99,20 persen.

12. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan dasar cukup menggembirakan, kondisi ini memberikan indikasi bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun di DKI Jakarta cukup berhasil. Sekitar lebih dari 90 persen penduduk usia 7-15 tahun, yang merupakan "*target goal*" pemerintah dalam program ini, masih aktif bersekolah pada tahun 2009. Pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan pemberian dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana APBD, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menaikkan persentase angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu pada pendidikan dasar di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Sasaran Penerima BOP adalah seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLBN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

Negeri (SMPLBN), dan SMAN/SMKN. BOP dialokasikan untuk membiayai pengelolaan kurikulum, penunjang kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana, pengembangan ketenagaan, kesiswaan dan ekstrakurikuler, peningkatan mutu, rumahtangga sekolah, daya dan jasa, ATK dan perlengkapan perkantoran, dan humas.

13. Tingkat Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk di Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan penduduk di provinsi lain di Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengalokasikan lebih dari 20 persen dari total APBD untuk pendidikan. Persentase ini melampaui angka yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas yaitu sebesar 20 persen.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat pula dilihat dari indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2006, telah terjadi peningkatan rata-rata pendidikan masyarakat Jakarta yang cukup berarti pada tahun 2009. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penduduk yang menamatkan pendidikan di tingkat SLTA ke atas, yaitu dari 47,56 persen pada tahun 2006 menjadi 67,2 persen pada tahun 2009. Khusus untuk yang tamat S1 ke atas naik dari 7,58 persen pada tahun 2006 menjadi 10,8 persen pada tahun 2009.

C. Program *Dedicated*

Program Prioritas Daerah yang bersifat *top-down* dikenal dengan sebutan Program *Dedicated* yang merupakan komitmen dari Pimpinan Daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, lintas sektor, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Memelihara urgensinya, dapat bersifat *multi-years* yaitu kegiatan yang waktu penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, berbentuk fisik, dalam satu kesatuan fungsi dan satu kesatuan kontrak. Di bidang fisik, terdapat pembangunan *fly over*, *underpass*,

banjir kanal timur, transportasi massal dan sejenisnya. Di bidang sosial, terdapat perbaikan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan sejenisnya. Mekanisme pengalokasian anggaran untuk Program *Dedicated* menggunakan pendekatan *top-down* sehingga mengikat instansi wilayah maupun sektoral untuk melaksanakan program tersebut.

D. Program APBD 2009

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan di atas maka, kebijakan prioritas pengalokasian APBD 2009 diarahkan untuk menjamin terlaksananya ketiga prioritas pembangunan di atas. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditunjukkan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Lebih rinci prioritas APBD dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prioritas pengalokasian pada kegiatan yang berskala besar, nyata dan untuk kepentingan masyarakat luas (program *dedicated*)
2. Prioritas pengalokasian pada SKPD yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan langsung publik, misalnya panti sosial, puskesmas, sekolah.
3. Prioritas pengalokasian untuk menjamin keseimbangan kapasitas aparat dan kemudahan akses masyarakat (penguatan kapasitas Kecamatan dan Kelurahan, serta PPMK)
4. Prioritas pengalokasian untuk meningkatkan proporsi belanja tingkat wilayah (kotamadya, kecamatan dan kelurahan) melalui pendelegasian kewenangan untuk urusan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
5. Prioritas pengalokasian untuk penambahan kesejahteraan pegawai yang diperoleh dari efisiensi belanja non-fisik.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan dengan berpedoman pada, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sejalan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut maka pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalamnya memuat tentang hak dan kewajiban daerah yang dibayarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, yang mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Data realisasi pengelolaan keuangan yang disajikan dalam LKPJ Tahun 2009 ini belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2009 terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Bagi Hasil Pajak terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) berasal dari SDA Sektor Perikanan, Minyak Bumi dan Gas Alam. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari APBN merupakan dana Hibah dan dana penyesuaian yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat.

Untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah, kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Intensifikasi Pajak dan Retribusi, antara lain melalui :

- 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
- 6) Peningkatan *survey* atau observasi di lapangan melalui pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi;

- 7) Penguatan basis pajak utamanya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- b. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, antara lain melalui:
- 1) Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
 - 2) Pengkajian jenis retribusi yang sudah tidak layak lagi dipungut dan perlu dihapus;
 - 3) Pengkajian mekanisme pajak dan retribusi untuk target *group* baru;
 - 4) Penyederhanaan sistem pemungutan pajak untuk mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
 - 5) Peningkatan pendapatan bagi hasil pajak yang diperoleh dari Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat.
- c. Pengelolaan BUMD yang lebih efektif dan efisien, antara lain melalui :
- 1) Perbaikan manajemen menuju *Jakarta Incorporated (Holding Company)*;
 - 2) Pembentukan *sub holding company*;
 - 3) Percepatan *divestasi* saham-saham Pemda pada PT Patungan yang merugi;
 - 4) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi.
- d. Peningkatan Layanan BLUD, antara lain melalui :
- 1) Restrukturisasi BLUD
 - 2) Peningkatan kualitas SDM pengelola BLUD
 - 3) Penerapan sistem elektronik dalam pelayanan BLUD, seperti e-ticketing, e-queing

- e. Peningkatan Dana Perimbangan, antara lain melalui peningkatan dana perimbangan melalui koordinasi *tax sharing* dengan pemerintah, khususnya bagi hasil pajak dengan rasionalisasi NJOP, penyesuaian Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), penyisiran obyek pajak orang pribadi dan memfasilitasi peranan PPAT, melakukan percepatan balik nama kepemilikan apartemen, pertokoan dan perkantoran.
- f. Peningkatan koordinasi untuk memperoleh Bantuan Dana Penyeimbang dan Hibah dari Pemerintah.

2. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah sampai akhir Tahun 2009 sebesar Rp.19.264.780.560.785,00 atau 99,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.19.371.835.508.395,00. Secara lebih rinci, realisasi Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

- PAD dapat direalisasikan sebesar Rp.10.608.155.177.783,20 atau 100,71% dari target yang ditetapkan Rp.10.363.435.508.395,00.
- Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar Rp.8.650.835.929.772,00 atau 96,03 persen dari target yang ditetapkan Rp.9.008.400.000.000,00.
- Walaupun tidak ditargetkan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dapat terealisasi sebesar Rp.5.789.453.230,00.

Untuk lebih jelasnya, realisasi Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

TABEL 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009

No	Uraian	Rencana	Realisasi		Bertambah / (Berkurang)
			Rp	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6 (4-3)
1.	Pendapatan Asli Daerah	10.363.435.508.395,00	10.608.155.177.783,00	100,71	244.719.669.388,22
2.	Dana Perimbangan	9.008.400.000.000,00	8.650.835.929.772,00	96,03	(357.564.070.288,00)
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	5.789.453.230,00	-	5.789.453.230,00
	Jumlah	19.371.835.508.395,00	19.264.780.560.785,00	99,45	(107.054.947.709,78)

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD sebesar Rp.10.608.155.177.783,00 berasal dari Pajak Daerah yang terealisasi sebesar 8.560.332.235.980,00 atau 99,37% dari rencana yang ditetapkan Rp.8.615.000.000.000,00, Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp.418,930.556.650,50 atau 108,91% dari rencana yang ditetapkan Rp.384.640.000.000,00, Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp.190.102.660.688,00 atau 105,61% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 180.000.000.000,00 dan Lain-Lain PAD Yang Sah terealisasi sebesar Rp.1.438.789.724.464,72 atau 121,54% dari rencana yang ditetapkan Rp.1.183.795.508.395,00

Khusus Pajak Daerah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 3.2
Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009

No.	Uraian	Rencana	Realisasi		Bertambah / (Berkurang)
			Rp	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6 (4-3)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	2.687.000.000.000,00	2.766.961.102.529,00	102,98	79.961.102.529,00
2.	BBN Kendaraan Bermotor	2.450.000.000.000,00	2.542.533.323.110,00	103,78	92.533.323.110,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	770.000.000.000,00	671.464.087.091,00	87,20	(98.535.912.909,00)
4.	Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	80.000.000.000	127.003.025.405,00	158,75	47.003.025.405,00
5.	Pajak Hotel	708.062.000.000,00	605.667.993.819,00	85,54	(102.394.066.181,00)
6.	Pajak Restoran	752.287.000.000,00	753.198.530.719,00	100,12	911.530.719,00
7.	Pajak Hiburan	300.000.000.000,00	267.319.692.454,00	89,11	(32.680.307.546,00)
8.	Pajak Reklame	319.651.000.000,00	274.909.287.168,00	86,00	(44.741.712.832,00)
9.	Pajak Penerangan Jalan	408.000.000.000,00	412.485.256.537,00	101,10	4.485.256.537,00
10.	Pajak Parkir	140.000.000.000,00	138.789.997.148,00	99,14	(1.210.002.852,00)
	Jumlah	8.615.000.000.000,00	8.560.332.235.980,00	99,37	(54.667.764.020,00)

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

- b. Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp.8.650.835.929.772,00 berasal dari Bagi Hasil Pajak yang terealisasi sebesar Rp.8.580.445.670.576,00 atau 95,57% dari rencana yang ditetapkan Rp.8.978.400.000.000,00 dan Bagi Hasil Bukan Pajak yang terealisasi sebesar Rp. 70.390.259.196,00 atau 234,63% dari rencana yang ditetapkan Rp30.000.000.000,00.

Realisasi Dana Perimbangan, secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut.

TABEL 3.3
Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2009

No.	Uraian	Rencana	Realisasi		Bertambah / (Berkurang)
			Rp	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6 (4-3)
I.	Bagi Hasil Pajak	8.978.400.000.000,00	8.580.445.670.576,00	95,57	(397.954.329.424,00)
	▪ Pajak Bumi dan Bangunan	2.100.000.000.000,00	2.202.501.676.500,00	104,88	102.501.676.500,00
	▪ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.800.000.000.000,00	1.456.608.965.097,00	80,92	(343.391.034.903,00)
	▪ Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.078.400.000.000,00	4.078.400.000.000,00	96,91	(157.064.971.021,00)
II.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	30.000.000.000,00	70.390.259.196,00	234,63	40.390.259.196,00
	▪ Pendapatan SDA Sektor Perikanan	250.836.000,00	579.102.973,00	230,87	328.266.973,00
	▪ Pendapatan SDA Sektor Minyak Bumi	27.159.802.683,00	69.789.791.823,00	256,96	42.629.989.140,00
	▪ Pendapatan SDA Sektor Gas Alam	2.589.361.317,00	21.364.400,00	0,83	(2.567.996.917,00)
	Jumlah	9.008.400.000.000,00	8.650.835.929.772,00	96,03	(357.564.070.228,00)

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan yang Dihadapi

Secara umum, beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam merealisasikan Pendapatan Daerah antara lain :

- 1) Turunnya tingkat hunian (*occupancy rate*) kamar hotel, utamanya bintang lima dari 61% pada tahun 2008 menjadi 57% pada tahun 2009, sehingga berimplikasi pada tidak tercapainya target Pajak Hotel.
- 2) Belum diterapkannya kenaikan tarif parkir dengan sistem zoning, mengingat kondisi perekonomian yang masih belum menguntungkan akibat krisis keuangan global, sehingga mempengaruhi tercapainya target Pajak Parkir.

- 3) Pesatnya pembangunan SPBU di daerah perbatasan Jakarta dan terjadinya perubahan pola penggunaan kendaraan dari roda empat ke roda dua, yang berimplikasi pada tidak tercapainya target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Berkembangnya obyek hiburan alternatif yang dapat dilakukan secara individu seperti *game online*, tv kabel dan lain-lain yang berpengaruh terhadap pencapaian target Pajak Hiburan.
- 5) Berkembangnya media iklan melalui media lain seperti internet, televisi, dan radio, yang berpengaruh terhadap pencapaian target Pajak Reklame.
- 6) Masyarakat masih khawatir akan dampak krisis keuangan global, sehingga mereka lebih memilih investasi jangka pendek yang lebih tinggi likuiditasnya. Hal ini telah berdampak pada menurunnya transaksi jual beli tanah dan bangunan, pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian target Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan.

b. Solusi

Beberapa upaya yang telah dan terus dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, utamanya berkaitan dengan realisasi dana perimbangan.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima dengan penyederhanaan proses administrasi agar masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran Pajak Daerah.

- 3) Meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan kepada masyarakat maupun aparat yang mengelola pendapatan daerah, agar seluruh pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
- 4) Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat maupun aparat pemungut dengan tujuan agar adanya pemahaman dari segi ketentuan peraturan yang menjadi dasar pemungutan pendapatan daerah;
- 5) Dilakukannya intensifikasi pendapatan daerah terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah bekerjasama dengan BPKP;
- 6) Dilakukannya ekstensifikasi pendapatan daerah berdasarkan potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, disamping mengkaji peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam pemungutan pendapatan daerah agar target yang ditetapkan dicapai dengan optimal;
- 7) Perlu upaya diversifikasi hiburan melalui pendekatan kolosal atau massal, misalnya even-event musik tingkat internasional dan nasional yang diminati masyarakat, khususnya generasi muda.
- 8) Menerapkan on-line system dalam Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan.
- 9) Mengkaji secara lebih rinci untuk penerapan tarif parkir dengan sistem zoning.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Struktur Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. **Belanja Pegawai**, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. **Belanja Bunga**, digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. **Belanja Hibah**, digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya atau kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. **Belanja Bantuan Sosial**, digunakan untuk pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. **Belanja Bantuan Keuangan**, diberikan kepada Organisasi sosial Kemasyarakatan, Organisasi sosial Keagamaan, Partai Politik dan Dewan Pimpinan Daerah (DPA) dan **Belanja Tidak Terduga**, digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Untuk BL terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. **Belanja Pegawai**, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. **Belanja Modal**, digunakan untuk pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya;

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2009, antara lain meliputi :

- a. Peningkatan belanja pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur;
- b. Peningkatan pelayanan angkutan umum;
- c. Peningkatan mutu pelayanan publik;
- d. Pengembangan permukiman dan perumahan rakyat;
- e. Pengembangan kawasan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- f. Peningkatan pelayanan untuk rumah tangga miskin;
- g. Penyediaan subsidi biaya produksi untuk layanan BLUD yang tarif pelayanannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Efisiensi Belanja utamanya TAL, Honorarium dan BBM kendaraan operasional/dinas;
- i. Percepatan penyelesaian kegiatan tahun jamak;
- j. Memenuhi kewajiban anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari

Belanja Daerah;

- k. Menjamin ketersediaan alokasi anggaran dedicated program;
- l. Pembangunan/pemeliharaan Gedung Sekolah, Puskesmas, Kantor Kecamatan dan Kelurahan;
- m. Renovasi Gedung Blok G Balaikota (green building);
- n. Penyusunan dan penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru.

2. Realisasi Belanja

Dari rencana Belanja Daerah sebesar Rp.23.594.857.431.915,00, sampai akhir Tahun Anggaran 2009 telah dapat direalisasikan sebesar Rp19.502.449.348.070,00 atau 82,66%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi Belanja Daerah tahun 2008 yang hanya mencapai 79,2%.

Realisasi tersebut berasal dari BTL yang terealisasikan Rp6.831.286.572.182,00 atau 91,47% dari rencana sebesar Rp6.831.286.572.182,00 dan dari BL yang terealisasikan Rp13.253.878.045.308,00 atau 79,06% dari rencana sebesar Rp16.763.570.859.733,00.

Secara lebih rinci, realisasi Belanja Daerah tersebut dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

NO	JENIS	RENCANA	REALISASI		SISA
			Rp.	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6 (3-4)
1.	Belanja Tidak Langsung	6.831.286.572.182,00	6.248.571.302.762,00	91,47	582.715.269.420,00
	• Belanja Pegawai	6.354.307.619.959,00	5.874.734.965.143,00	92,45	479.572.654.816,00
	• Belanja Bunga	9.946.000.000,00	9.943.209.211,00	99,97	2.790.789,00
	• Belanja Hibah	338.996.929.283,00	305.274.309.265,00	90,05	33.722.620.018,00
	• Belanja Bantuan Sosial	70.662.500.000,00	58.020.461.866,00	82,11	12.642.038.134,00
	• Belanja Bantuan Keuangan	677.500.000,00	598.357.277,00	88,32	79.142.723,00
	• Belanja Tidak Terduga	56.696.022.940,00	0,00	0,00	56.696.022.940,00
2.	Belanja Langsung	16.763.570.859.733,00	13.253.878.045.308,00	79,06	3.509.692.814.425,00
	• Belanja Pegawai	2.017.674.977.371,00	1.672.981.124.634,00	82,92	344.693.852.737,00
	• Belanja Barang dan Jasa	8.064.561.114.430,20	6.774.775.223.136,00	84,01	1.289.785.891.294,20
	• Belanja Modal	6.681.334.767.931,80	4.806.121.697.538,00	71,93	1.875.213.070.393,80
	Belanja Daerah	23.594.857.431.915,00	19.502.449.348.070,00	82,66	4.092.408.083.845,00

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Berkaitan dengan Belanja Modal, secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja Tanah

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.1.574.898.884.529,00 atau 63,38 persen dari rencana sebesar Rp.2.484.749.362.435,00 sehingga terdapat sisa Rp.909.850.477.906,00.

b) Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.1.149.607.984.735,00 atau 75,18 persen dari rencana sebesar Rp.1.529.175.425.386,80 sehingga terdapat sisa Rp.379.567.440.681,80.

c) Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.1.406.459.458.495,00 atau 79,82 persen dari rencana sebesar Rp.1.761.970.098.227,00 sehingga terdapat sisa Rp.355.510.639.732,00.

d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.565.756.815.977,00 atau 73,42 persen dari rencana sebesar Rp.770.528.319.717,00 sehingga terdapat sisa Rp.204.771.503.740,00.

e) Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.109.398.553.802,00 atau 81,09 persen dari rencana sebesar Rp.134.911.562.166,00 sehingga terdapat sisa Rp.25.513.008.364,00.

3. Permasalahan dan Solusi

a. **Permasalahan yang Dihadapi**

Secara umum, beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Belanja Daerah Tahun 2009, antara lain:

- 1) Tahun 2009 merupakan tahun dimulainya penerapan pengelolaan keuangan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Perubahan yang terjadi adalah dalam penerbitan SPM dan verifikasi yang sebelumnya dilakukan oleh BPKD (d/h Biro Keuangan), tahun 2009 dilakukan oleh SKPD sendiri. Dengan demikian, tahun 2009 masih merupakan proses pembelajaran SKPD dalam pengelolaan keuangan yang baru.

- 2) Tahun 2009 mulai diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada awal Januari 2009, Kepala SKPD (eselon II) yang merupakan Pengguna Anggaran telah ditetapkan, namun pejabat dibawahnya, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum ditetapkan. Hal ini berpengaruh terhadap mulainya pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD.
- 3) Disamping itu, terdapat beberapa kegiatan/belanja yang tidak dapat dilaksanakan, antara lain:
 - a) Beberapa belanja untuk pembebasan tanah menghadapi masalah bukti kepemilikan yang tidak lengkap, kesepakatan harga yang tidak tercapai dan sengketa, seperti Pembebasan Tanah untuk pembangunan Rusun Jatinegara dan Rusun Waduk Pluit, Pembebasan Tanah untuk Busway Harsono RM dan Jl. Inspeksi Sunter Hulu, Pembebasan Tanah untuk Fly Over Pramuka dan Pembebasan Tanah untuk SDN Cengkareng 02.
 - b) Keterbatasan peserta lelang dalam pengadaan bus (Busway), sehingga dilakukan lelang ulang, yang berakibat pada tidak cukup waktu pelaksanaan. Disamping itu, proses lelang juga

menunggu persetujuan *multiyears* dari DPRD yang baru diterbitkan pada bulan Agustus 2009.

- c) Belum terbitnya persetujuan spesifikasi teknis dalam kegiatan pengadaan mobil derek dari Departemen Perhubungan.
- d) Kegiatan *Online* Pajak Hotel dan Restoran, baru diselesaikan pelelangan karena adanya arahan Depkominfo untuk merubah cara *online* dari membangun sistem menjadi sewa, agar lebih efisien. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan kode rekening yang harus dilakukan dalam APBD Perubahan (APBD-P 2009).
- e) Kegiatan pembebasan tanah untuk Depo MRT belum dapat direalisasikan karena belum adanya kesepakatan antara Pemda dengan PT. Metropolitan Kencana tentang kewajiban fasos/fasum. Hal ini berpengaruh terhadap penetapan luasan lahan yang harus dibebaskan oleh Pemprov DKI.
- f) Untuk Pembangunan Terminal Pulogebang dan Pembangunan Fly Over (FO) Tubagus Angke serta FO Bandengan, juga belum dapat dilaksanakan karena persetujuan *multiyears* dari DPRD baru diterbitkan pada bulan Agustus 2009. Khusus Pembangunan Terminal Pulogebang hambatannya juga berkaitan dengan persetujuan *in/out ramp* dari Terminal Pulogebang masuk ke Jalan Tol yang belum diterbitkan.

b. Solusi

Beberapa upaya yang telah dan terus dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pengelola keuangan di masing-masing SKPD, akan terus diupayakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2005, utamanya berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- 2) Mengingat bukti kepemilikan tanah di DKI merupakan masalah yang kompleks (krusial), maka proses penelitiannya perlu waktu yang mencukupi. Untuk itu, sebelum dialokasikan anggaran untuk pembebasan tanah sebaiknya direncanakan secara lebih matang dengan terlebih dahulu meneliti bukti-bukti kepemilikan tanah dimaksud.
- 3) Berkaitan dengan tidak tercapainya kesepakatan harga antara Pemprov dengan pemilik tanah, akan terus diupayakan pendekatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- 4) Mengenai kegiatan-kegiatan yang bersifat multiyears, Eksekutif akan mengupayakan untuk lebih awal menyampaikan surat permohonan persetujuan ke DPRD mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Diharapkan, persetujuan DPRD tentang multiyears juga dapat diterbitkan lebih awal, sehingga proses pelelangan multiyears dapat dilakukan tepat waktu.

- 5) Terhadap belum adanya kesepakatan antara Pemprov dengan PT Metropolitan Kencana (PT MK) berkaitan dengan fasos fasum, akan terus diupayakan pendekatan dengan pihak PT MK dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk ketetapan hukum, agar Pemprov DKI mempunyai landasan hukum dalam membayar ganti rugi.
- 6) Untuk pembangunan Terminal Pulogebang, Pemprov DKI secara formal akan mengajukan surat kepada Menteri Perhubungan agar kiranya *in/out ramp* dari Terminal Pulogebang ke Jalan Tol dapat disetujui.

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari komponen Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2009, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan Pembiayaan

- 1) Menggunakan seluruh SiLPA Tahun 2008 sebesar Rp.4.446.373.058.586,11
- 2) Merencanakan transfer dari Dana Cadangan Daerah sebesar Rp.150.000.000.000,00.

b) Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT MRT Jakarta, PT Bank DKI, PT Jakarta Tourissindo, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
- 2) Membayar Hutang Pokok yang jatuh tempo.
- 3) Memberikan Pinjaman Daerah berupa Dana Bergulir pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)

2. Realisasi Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.4.446.373.058.586,11 atau 96,74% dari rencana sebesar Rp.4.596.373.058.586,00 . Realisasi tersebut hanya berasal dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2008. Sedangkan transfer dari Dana Cadangan Daerah (DCD) sebesar Rp.150.000.000.000,00 tidak direalisasikan karena *cash flow* sudah mencukupi.

Untuk Pengeluaran Pembiayaan yang dipergunakan untuk PMP dapat direalisasikan sesuai dengan rencananya, yakni sebesar Rp.238.464.896.483,00. Demikian juga untuk Pemberian Pinjaman Daerah berupa Dana Bergulir PPMK juga dapat direalisasikan sesuai dengan rencana sebesar Rp.60.750.000.000,00. Sementara itu, untuk Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo dapat direalisasikan sebesar Rp.71.869.164.117,00 atau 96,94% dari rencana sebesar Rp.74.136.238.116,00. Dengan demikian, total Pengeluaran Pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp.371.084.060.600,00 atau 99,39% dari rencana sebesar Rp.373.351.135.066,00

D. Dana Cadangan Daerah (DCD)

Posisi Dana Cadangan Daerah (DCD) per 31 Desember 2009 sebesar Rp.686.421.294.357,56, atau mengalami peningkatan sebesar Rp.70.153.127.273,00 (10,22%) dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2008. Penambahan tersebut berasal dari bunga deposito selama 1 tahun dari Bank DKI maupun Bank BRI. Dapat ditambahkan bahwa walaupun dalam Perda APBD 2009 ada rencana transfer dari DCD sebesar Rp.150.000.000.000,00, namun rencana tersebut tidak direalisasi, sehingga tidak mengurangi besaran DCD.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2007-2012 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 yang meliputi Program *Dedicated* dan Program-Program Urusan Pemerintahan, baik wajib maupun pilihan. Adapun hasil-hasilnya antara lain:

A. Program *Dedicated*

Program *Dedicated* merupakan program prioritas yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.

Untuk Program Dedicated tahun 2009, *output* yang dihasilkan antara lain:

1. Pengendalian Banjir

a. Pembebasan Tanah Banjir Kanal Timur (BKT)

- Tahun 2009 telah dibebaskan tanah BKT seluas 242.315,7 M² yang terdiri dari profil basah 179.884,7 M² dan koridor kering seluas 62.431 M²
- Dengan demikian, total tanah BKT yang telah dibebaskan menjadi seluas 2.638.696,1 M² yang terdiri dari profil basah 2.120.889,5 M² dan koridor kering seluas 517.806,6 M²
- Terbangunnya BKT, sehingga aliran air telah dapat tembus ke laut

b. Normalisasi Sungai dan Saluran

- Terlaksananya pengerukan sungai dan saluran 307.931,7 m³, yakni sungai Ciliwung, sungai Cipinang dst, dan saluran Kalilagoa Buntu, Kali Cakung Lama, Kali Duri, Kali Grogol, dan Kalilagoa Timur.

- Terlaksananya pemasangan sheet pile sepanjang 416 M² di sungai MookerVaart dari kali Pakin.
- Terlaksananya pengerukan sebanyak 307.931,7 m³ di Kali/Saluran

c. Penataan Waduk Cilangkap

- Terlaksananya pembangunan 1 unit pintu air
- Terlaksananya penurapan dan peninggian turap sepanjang 492 m' + 199 m'.
- Terlaksananya galian tanah sebanyak 6.647,44 m³.
- Terlaksananya bangunan 1 unit bangunan limpas dan koker.
- Terlaksananya pemasangan cerucuk dan dolken sepanjang 160 m'

2. Pembangunan Perhubungan dan Transportasi

a. Optimalisasi, Perluasan dan penambahan jaringan jalan

- Terlaksananya inventarisasi Jl. Raya Bekasi dari terminal Pulo Gadung s/d batas DKI (segment persimpangan Jl. DR KRT Rajiman); Jl. Pulo Gebang lanjutan; Simpang Bintara - Pondok Kopi, serta Jl. Kembangan Raya (Walikota s.d Outer Ring Road)
- Terlaksananya pembebasan tanah terusan Jl. I Gusti Ngurah Rai, seluas 2.539 m² serta Jl. Kembangan Raya menuju Arteri W1, seluas 8.684 m².
- Terlaksananya peningkatan Jl. Joglo Raya lanjutan, seluas 8.739 m² (pelebaran dan hotmix)

b. Pembangunan Terminal Bus Pulogebang.

- Terlaksananya proses pelelangan *multiyears* pembangunan terminal.

c. Peningkatan Angkutan Umum Penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu:

- Terlaksananya pembangunan breakwater di Muara Angke sepanjang 650 m.
- Terlaksananya pematangan lahan terminal pelabuhan Muara Angke dengan luas 2.650 m².

d. Peningkatan Pengelolaan Busway

- Perluasan halte busway koridor 1 sebanyak 6 (enam) halte.
- Penyempurnaan fasilitas Terowongan Penyeberangan Orang (TPO) Kota.
- Peningkatan emplasemen terminal eks Depo K unseluas 2.464 m².
- Perawatan fasilitas pendukung *busway* sebanyak 3 koridor.

3. Penanggulangan Polusi dan Perubahan Iklim

a. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

- Tertatanya taman seluas 18.000 m²
- Terpeliharanya areal taman seluas 1.315.408 m²
- Tertatanya areal jalur hijau seluas 67.813 m²
- Terpeliharanya areal jalur hijau seluas 1.346.825 m²
- Terbangunnya sarana estetika kota 2 lokasi
- Terpeliharanya sarana estetika kota 223 unit

b. Polusi Udara

- Terlaksananya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada hari minggu terakhir disetiap bulannya di Jl. Thamrin-Sudirman, selanjutnya setiap hari minggu ke 2 setiap bulan di masing-masing wilayah, dimana seluruh wilayah melaksanakan dua kali yaitu Jl.Rasuna Said (8 Maret dan 9 Agustus), Jl. Letjen. Suprpto (12 April dan 13 September) Jl. Pramuka (10 Mei dan 11 Oktober) Kawasan Kota Tua (14 Juni dan 16 Nopember), Jl.Danau Sunter Selatan (12 Juli dan 13 Desember)
- Terlaksananya uji emisi terhadap 73.704 kendaraan
- Tersedianya alat pemantau pencemaran udara 1 Unit

c. Perubahan Iklim

- Pembangunan tanggul rob Cilincing Marunda Martadinata Pantai Utara Jakarta sepanjang 690 m'

4. Peningkatan Kualitas Kebutuhan Dasar Masyarakat

a. Pelayanan Kesehatan Untuk Gakin dan KLB

- Terlayannya jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) dengan kartu Gakin pada Puskesmas sebanyak 1.324.576 kasus (2008) dan 1.890.248 kasus (2009)
- Terlayannya JPK dengan kartu Gakin pada Rumah Sakit sebanyak 163.107 kasus (2008) dan 154.377 kasus (2009)
- Terlayannya JPK dengan SKTM pada Rumah Sakit sebanyak 37.313 kasus (2008) dan 191.751 kasus (2009)
- Terlayannya JPK kasus bencana atau KLB pada Rumah Sakit sebanyak 37.313 kasus (2008) dan 21.868 kasus (2009)

b. Pelayanan Pendidikan

- Terlaksananya pemberian BOP untuk 1.241 siswa TK Negeri.
- Terlaksananya pemberian BOP untuk 668.279 siswa SDN dan 529 siswa SDPLB dan BOS untuk 844.617 Siswa SD Negeri dan Swasta
- Terlaksananya pemberian BOP untuk 9.317 siswa MI Negeri
- Terlaksananya pemberian BOP untuk 228.493 siswa SMPN dan SMPLB untuk 111 siswa dan BOS untuk 354.852 Siswa SMP Negeri dan Swasta
- Terlaksananya pemberian BOP untuk 18.957 siswa MTs Negeri
- Terlaksananya pemberian BOP untuk 92.226 siswa SMAN
- Terlaksananya pemberian BOP untuk 42.745 siswa SMKN
- Terlaksananya pemberian BOP untuk 732 siswa SLB

c. Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberculosis (TBC)

- Terlaksananya penanggulangan DBD sebanyak 18.149 orang
- Terlaksananya penanggulangan TBC dengan penemuan 61% kasus (CDR) TBC.
- Tertanganinya 6.962 kasus TBC BTA+

d. Peningkatan kualitas Permukiman dan Perbaikan Kampung

- terselesaikannya pembangunan Rusun Pulo Gebang 100 unit dan Rusun Pinus Elok 400 unit
- terselesaikannya struktur Rusun Marunda 400 unit, Rusun Cakung Barat 150 unit; Rusun Pegadungan 200 unit;.
- terlaksananya perbaikan kampung di 112 RW sasaran, antara lain Jakarta Pusat 20 RW, Jakarta Utara 11 RW, Jakarta Barat 26 RW, Jakarta Selatan 29 RW, dan Jakarta Timur 26 RW

5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

a. Dana Bergulir

- Tersalurkannya dana bergulir untuk 4.992 Pemanfaat, sehingga total pemanfaat dana bergulir telah mencapai 52,5 Milyar
- Terlaksananya audit PPMK pada 202 Kelurahan

b. Bina Fisik dan Sosial

- Tersalurkannya dana bina sosial 2.253 Kegiatan senilai Rp 36,3 M
- Tersalurkannya dana bina fisik 5.668 kegiatan senilai Rp 36,3 M

6. Pengembangan Budaya Keragaman

a. Kota Tua

- Terdatanya kepemilikan dan fungsi 85 bangunan
- Terlaksananya Temu muka dengan 56 stakeholder
- Terlaksananya konservasi 2 bangunan cagar budaya
- Terlaksananya pembuatan konsep penataan sentra industri kreatif
- Terselenggaranya 4 kali atraksi wisata

b. Perkampungan Budaya Betawi

- Terlaksananya pembebasan tanah untuk perluasan setu
- Terlaksananya sewa tanah untuk rumah adat betawi 1.500 m2

7. Penerapan Kaidah Good Governance

a. e-Procurement

- Diterapkannya e-announcement pada 487 SKPD/UKPD dari 706 SKPD/UKPD
- Diterapkannya e-regular tender pada 100 SKPD/UKPD untuk 418 Kegiatan dengan nilai Rp.3,070 Triliun

b. Komunikasi masyarakat melalui elektronik

- Berfungsinya 2,5 juta sms dari warga
- Dikunjunginya website jakarta.go.id sebanyak 1 juta Pengunjung
- Dikunjunginya media on line warta DKI “beritajakarta.com” sebanyak 837 ribu Pengunjung

c. Integrasi Sistem Informasi

- Terselenggaranya sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis internet yang terintegrasi.
- Berfungsinya sistem monitoring pelaksanaan APBD berbasis mobile device

d. Implementasi sistem akuntansi pemerintah

- Terlaksananya pendampingan penyusunan neraca dan laporan keuangan berbasis SAP di 46 SKPD yang termasuk entitas akuntansi dalam rangka meningkatkan opini audit BPK (2008 sudah WDP)

e. Reformasi Birokrasi

- Diterapkannya Perda 10/2008 ttg Organisasi Perangkat Daerah dg mengisi seluruh jabatan yang tersedia
- Ditetapkannya Pergub ttg Pembentukan 40 UPT
- Ditetapkannya Pergub 215/2009 tentang TKD sebagai upaya pemberian remunerasi
- Diimplementasikan kebijakan pendelegasian 13 kewenangan pelayanan pada tingkat kecamatan dan 3 kewenangan pada tingkat kelurahan.

B. Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan pendidikan antara lain:

a. Program wajib belajar 12 tahun,

- Terlaksananya penanganan terhadap siswa miskin khususnya pada jenjang pendidikan menengah melalui program kartu gratis sekolah putus sekolah sebanyak 6.037 orang.
- Terlaksananya pemberian BOP baik untuk TK Negeri, SDN/MI/SDPLB Negeri, SMPN/MTsN/SMPLB, SMAN/SMKN, SLB untuk 1.062.630 siswa.

b. Program peningkatan mutu pendidikan,

- Terlaksananya pemberian Biaya Operasional Buku (BOB) untuk sekolah Negeri yaitu SMAN 91.886 siswa, SMKN 41.848 siswa, MAN 8.379 siswa.
- Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan olimpiade sains nasional tingkat SD, tingkat Pendidikan Luar Biasa (PLB), tingkat, tingkat Pendidikan Luar Biasa (PLB).
- Terlaksananya UASBN.
- Terlaksananya penyempurnaan kebijakan-kebijakan seperti juklak/juknis RAPBS, juknis UAN, juknis BOP, pengendalian pelaksanaan ujian sekolah SMP/MTs.
- Terlaksananya pembinaan manajemen pengawas sekolah TK, SD, SMP, dan LB sebanyak 200 orang.
- Terlaksananya Tes kemampuan calon kepala sekolah sebanyak 600 orang.
- Terlaksananya program S1 dan sertifikasi untuk 1.294 orang guru.

e. Program pendidikan non formal dan informal,

- Terlaksananya pembinaan pendidikan kesetaraan yaitu paket A sebanyak 5.000 orang, paket B sebanyak 6.000 orang, paket C sebanyak 5.500 orang.
- Tersedianya buku administrasi di Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) sebanyak 3.150 buku
- Terlatihnya keterampilan 350 orang di PKBM tingkat dasar/terampil;
- Terlaksananya pemberantasan buta aksara 5.400 orang;

f. Program pendidikan luar biasa,

- Terlaksananya biaya operasional pendidikan inklusif 20 sekolah.
- Terselenggaranya pusat kegiatan pendidikan inklusif sebanyak 20 sekolah.

g. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

- Terlaksananya pembangunan 19 ruang kelas baru SMK.
- Terlaksananya pembangunan 50 ruang kelas baru SMA.
- Terlaksananya rehab total 9 SDN.
- Terlaksananya rehab total 5 SMPN.
- Terlaksananya rehab total 11 SMKN/SMAN.
- Rehab berat sebanyak 360 sekolah.
- Pengadaan meubeler UGB/RKBSMA/SMA Negeri 8.873 unit.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pendidikan antara lain:

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan APM - SMA/SMK tetap 85,13% pada tahun 2009, dipertahankannya APK pendidikan dasar di atas 100% yaitu APK SD 110,95% dan APK SMP 104,89%.
- b. Jumlah sekolah yang sudah SSN/RSBI/SBI
 - SD (79 RSBI, 7 SBI)
 - SMP (66 SSN, 19 RSBI, 15 SBI)

- SMA (103 SSN, 5 RSBI, 8 SBI)
 - SMK (22 SSN, 4 SBI)
- c. Menurunnya Angka Putus Sekolah:
- SD dari 571 siswa pada tahun 2008 menjadi 612 siswa pada tahun 2009.
 - SMP dari 1.947 siswa pada tahun 2008 menjadi 1.085 siswa pada tahun 2009.
 - SMA dari 1.253 siswa pada tahun 2008 menjadi 943 siswa pada tahun 2009.
- d. Angka kelulusan: SD tetap 100%, SMP 99,81%, SMA meningkat dari 92,08% (2008) menjadi 96,5% (2009), SMK meningkat dari 93,28% (2008) menjadi 97,65% (2009).
- e. Rata-rata nilai UAN di atas standar nasional yaitu SD 6,79; SMP 7,04; SMA 7,47 dan SMK 7,49.
- f. Rata-rata Lama Sekolah tetap 11,56 tahun.
- g. Meningkatnya jumlah sekolah yang mendapat sertifikasi ISO 9001:2000.
- SD dari 2 (tahun 2008) menjadi 3 (tahun 2009)
 - SMP dari 5 (tahun 2008) menjadi 10 (tahun 2009)
 - SMA dari 14 (tahun 2008) menjadi 22 (tahun 2009)
 - SMK dari 15 (tahun 2008) menjadi 18 (tahun 2009)
- h. Meningkatnya jumlah sekolah berstandar nasional (SSN):
- SD dari 85 (tahun 2008) menjadi 91 (tahun 2009)
 - SMP dari 73 (tahun 2008) menjadi 100 (tahun 2009)
 - SMA dari 62 (tahun 2008) menjadi 116 (tahun 2009)
- i. Prestasi olimpiade sains nasional;
- Tingkat SD mendapatkan 1 medali emas dan best overall, 4 medali perak dan 1 perunggu,
 - Tingkat Pendidikan Luar Biasa (PLB) meraih medali emas dan best theory & overall, 1 medali perak,
 - Tingkat SMP meraih medali 7 medali emas dan best theory, 10 medali perak, 3 medali perunggu,

- Tingkat SMA meraih juara umum (14 medali emas, 22 medali perak, 20 medali perunggu).
- Tingkat Pendidikan Luar Biasa (PLB) telah meraih medali emas bidang matematika dan satu medali emas bidang IPA

2. Urusan Kesehatan

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan kesehatan antara lain:

a. Program pencapaian dan penanggulangan penyakit menular,

- Terlaksananya antisipasi dan penanggulangan KLB penyakit menular di Provinsi DKI Jakarta.
- Terlaksananya pelatihan program penyakit menular.
- Terlaksananya lokakarya penyakit menular.
- Terpantaunya penderita malaria dan renew dan neglected disease dan dapat ditangani 100%.
- Terlaksananya surveillance penyakit menular berbasis rumah sakit dan laboratorium.
- Tersedianya obat penyakit menular.
- Terpantaunya situasi penyakit potensial KLB di Provinsi DKI Jakarta selama 12 bulan.

b. Program penurunan angka kematian ibu dan bayi,

- Terselenggaranya pelatihan tenaga kesehatan untuk pelayanan KIA/KIBBLA sebanyak 100 orang.
- Terlaksananya pemberian gizi kepada 150 orang dalam upaya mencegah anemia gizi.

c. Program peningkatan kesehatan anak balita,

- Terlaksananya perawatan terhadap seluruh balita gizi buruk.

- Terlaksananya uji coba perawatan pemulihan balita gizi buruk melalui Therapeutic Feeding Centre (TFC)/panti pemulihan gizi di puskesmas Kecamatan Kalideres.
- Terlaksananya 2 kali pemberian kapsul vitamin A, untuk bayi.
- Terlaksananya UCI pada seluruh kelurahan
- Terlaksananya imunisasi lengkap 100%.
- Terlaksananya pemantauan dan pengawasan cold chain, pengembangan jejaring imunisasi, terbentuknya susunan Komda KIPPI tingkat provinsi.

d. Program pengembangan lingkungan sehat.

- Terlaksananya pengendalian vektor penyakit;
- Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi terhadap kualitas air bersih.

e. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

- Terlaksananya sosialisasi peningkatan pola hidup sehat masyarakat terhadap 35% target.
- Terselenggaranya promosi kesehatan kepada 600 orang.

f. Program pencegahan penyakit tidak menular,

- Tersedianya pelayanan jantung di 44 puskesmas dan 5 RSUD.
- Terlaksananya sosialisasi deteksi dini kanker serviks dan payudara pada 50 orang.
- Terlaksananya koordinasi program penyakit tidak menular

g. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

- Terlaksananya peningkatan mutu dan layanan RSUD, AGD, Balai Kesehatan Karyawan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Akademi Keperawatan Jakarta.

h. Program pengawasan obat dan makanan,

- Terlaksananya penyusunan formularium puskesmas.
- Terlaksananya pengawasan fasilitas farmasi, pada 100 sarana farmasi.
- Terlaksananya koordinasi FMM dengan bidang farmasi wilayah dan lintas sektor.
- Terlaksananya bimbingan teknis terhadap 50 sarana produksi alat kesehatan dan PKRT serta 150 sarana penyalur alat kesehatan.

i. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM),

- Terlaksananya akses pelayanan JPKM
- Tersusunnya sistem Jamkesda .

j. Program peningkatan gizi masyarakat,

- Terlaksananya pelatihan keluarga sadar gizi (kadarsi) pada 268 orang petugas kesehatan
- Terlaksananya pembinaan pos gizi dengan metode positive deviance untuk pencegahan masalah gizi buruk berbasis masyarakat di 6 lokasi.

k. Program kesehatan jiwa masyarakat,

- Tersedianya pelayanan kesehatan jiwa di 44 puskesmas kecamatan.
- Terselenggaranya pelatihan asuhan keperawatan kesehatan jiwa (CMHN) untuk tenaga kesehatan di 22 puskesmas kecamatan.
- Terlaksananya advokasi dan koordinasi pelayanan jarum suntik steril dan metadon bagi pengguna napza suntik.
- Terselenggaranya pelayanan pertukaran jarum suntik steril (PJSS) di 31 puskesmas kecamatan dan pelayanan metadon di 11 puskesmas kecamatan.

l. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit,

- Terpeliharanya sarana dan prasarana RSUD Pasar Rebo, Tarakan, Budhi Asih, Duren Sawit, Cengkareng dan Rumah Sakit Koja.

m. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya,

- Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas;
- Terlaksananya Quality Assurance (QA) pada 95%. Puskesmas kecamatan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001-2000

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kesehatan antara lain:

- a. Angka kematian bayi/IMR menurun dari 13,70 persen pada tahun 2008 menjadi 12,20 persen pada tahun 2009 (sesuai data BPS).
- b. Meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapatkan sertifikasi manajemen pelayanan ISO 9001:2000 dari 53 SKPDP pada tahun 2008 menjadi 54 SKPD dari 66 SKPD urusan kesehatan pada tahun 2009.
- c. Angka kesakitan DBD menurun dari 334,8/100.000 penduduk pada tahun 2008 menjadi 214,2/100.000 penduduk pada tahun 2009.
- d. Angka kematian DBD menurun dari 0,09% pada tahun 2008 menjadi 0,01% pada tahun 2009.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan pekerjaan umum antara lain:

a. Program pengendalian banjir,

- Terlaksananya penataan dan pengerukan kali Mookervart Hilir (sejajar jalan daan mogot, pertemuan sodetan Grogol Sekretaris s.d Cengkareng Drain) sepanjang 122 m’;
- Terlaksananya pemasangan sheet pile (2 sisi) dan pengerukan kali Pakin sepanjang 294 m’.
- Terlaksananya 4 unit pembangunan sistem pompa Cideng.
- Terlaksananya pembangunan pompa Kapuk di 2 lokasi (Kapuk IB dan Kapuk II)
- Terlaksananya pembangunan saluran pembuang Komplek PU Pasar Jumat sepanjang 96 m’.

b. Program pengembangan sistem drainase

- Terbangunnya saringan sampah otomatis kali Baru Timur–Cawang, kali Baru Timur – Cicilitan dan kali Baru Timur – Jagorawi

c. Program pemeliharaan dan operasional insfrastruktur pengendali banjir, drainase

- Terlaksanakannya pembersihan 41 saluran di Provinsi DKI Jakarta.
- Terlaksananya pemeliharaan 303 pompa, 2 saringan sampah dan 93 pintu air di 5 Kota Administrasi Jakarta.

d. Program pengerukan dan pemeliharaan sungai

- Terlaksananya pengerukan saluran drainase kota Jakarta Utara sepanjang 342.354 m³, drainase kota Jakarta Selatan sepanjang 185.772 m³, drainase kota Jakarta Barat sepanjang 260.041,32 m³, drainase kota Jakarta Timur sepanjang 185.228,80 m³, drainase kota Jakarta Pusat sepanjang 228.294,95 m³

e. Program pembangunan jalan dan jembatan,

- Terbangunnya jalan tembus Kelapa Gading - Terminal Pulo Gadung dan jalan tembus I Gusti Ngurah Rai.

- Terlaksananya perawatan berat wilayah Jakarta Pusat zona 1 seluas 143.432,06 m², Jakarta Utara zona 1 seluas 97.764,09 m², Jakarta Barat zona 1 seluas 155.390 m², Jakarta Selatan zona 1 seluas 147.060,81 m², Jakarta Timur zona 1 seluas 160.703,63 m², Jakarta Pusat zona 2 seluas 152.969,11 m², Jakarta Barat zona 2 seluas 166.764,40 m², Jakarta Selatan zona 2 seluas 197.418,22 m², Jakarta Timur zona 2 seluas 169.595,11 m², Jakarta Utara zona 2 seluas 112.382,92 m²
- Terlaksananya perawatan ringan tutup lobang jalan arteri/kolektor seluas 428.182 m²
- Terlaksananya penanganan perbaikan sarana prasarana untuk penanggulangan kerusakan infrastruktur Jalan di DKI Jakarta seluas 23.172,00 m².
- Terlaksananya pembangunan jembatan Jl. Teluk Gong (Kali Angke), jembatan Jl. Taman Malaka Selatan (kali Buaran & kali Jatikramat), jembatan Kalibata dan jembatan akses Marunda (kali Blencong dan Cakung Drain).
- Terlaksananya pelebaran jembatan Tanjung Duren.
- Terlaksananya peninggian jembatan Perintis Kemerdekaan
- Terlaksananya perbaikan 82 jembatan;
- Terlaksananya persiapan pembangunan fly over Tubagus Angke (Rel KA) dan fly over Bandengan (Bandengan Utara/ Selatan - Rel KA)
- Terlaksananya perbaikan 24 fly over dan underpass

f. Program pembangunan dan penataan bangunan gedung Pemda,

- Renovasi gedung blok G sebagai green building.

g. Program penyediaan gedung untuk layanan publik dan pemerintahan.

- Terlaksananya pembangunan (multy years) fasilitas rekreasi dan olahraga Boker Jakarta Timur.

- Terlaksananya penyelesaian pembangunan (multy years) gedung sarana sosial budaya Islamic Centre, pembangunan gedung sayap belakang KWK Jakarta Selatan, pembangunan gedung blok C & D KWK Jakarta Timur, pembangunan gedung blok B KWK Jakarta Barat, pembangunan gedung blok C2 KWK Jakarta Barat.
- Pembangunan Blok B dan D Gedung Arsip Provinsi DKI Jakarta.

h. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih

- Terlaksananya perbaikan IPAL yang sudah terbangun di 11 lokasi (Jatibaru, Malaka Sari, Untung Jawa, KWK Jaktim, KWK Jakbar, Waduk Melati, Waduk Tomang, Waduk Grogol, RS.Hewan Ragunan, Kebon Binatang dan Sunter Selatan)

i. Program peningkatan kinerja pengelolaan air limbah

- Terpeliharanya dan terawatnya IPAK Pulo Gebang.
- Terpeliharanya alat perangkap dan pemisah pasir IPAK Duri Kosambi dan IPAK Pulo Gebang.

j. Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan,

- Tersedianya kendaraan 10 unit compactor pengangkut sampah
- Terlaksananya pengadaan bak container sampah
- Terlaksananya pengelolaan sampah untuk 151 Pasar milik PD Pasar Jaya.
- Terlaksananya pengelolaan 55.200 Ton (184 hari) sampah di TPST (PDUK Cacing) dan 292.000 Ton (1 tahun) sampah di SPA Sunter.
- Terlaksananya jasa pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang.
- Terlaksananya swastanisasi kebersihan.
- Terlaksananya pembayaran *tipping fee* TPA Bantar Gebang untuk 1.898.000 Ton sampah.

- Terlaksananya pengelolaan 55.200 Ton (184 hari) sampah di PDUK Cacing dan 292.000 Ton (1 tahun) sampah SPA Sunter.

k. Program peningkatan kebersihan kota,

- Terlaksananya pemungutan retribusi kebersihan.
- Terkendalinya pengawasan kebersihan (massa) insidentil/emergency sampah.
- Tersedianya 13.076 kantong sampah biodegradable.
- Tersedianya leaflet dan poster kebersihan.
- Tersedianya billboard kebersihan.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pekerjaan umum antara lain:

- a. Bertambahnya 0.03% water ratio, sehingga water ratio 2009 menjadi 2.96%.
- b. Berkurangnya lama genangan di 6 kawasan (Kapak, Cideng, Pakin, Pasar Jumat, Cilincing dan Marunda) dari 4 Jam (2008) menjadi 2 Jam (2009)
- c. Berkurangnya tinggi genangan di kawasan Kapuk dan Cideng dari 0.60 M (2008) menjadi 0.30 M (2009).
- d. Bertambahnya kecepatan aliran air di kali Pakin dari 53 M3/detik (2008) menjadi 60 M3/detik (2009) dan Pasar Jum'at dari 0 M3/detik (2008) menjadi 15 M3/detik (2009).
- e. Terhindarnya 5 Ha kawasan utara Jakarta dari banjir akibat air pasang.
- f. Meningkatnya 0.02 % road ratio, sehingga road ratio 2009 menjadi 6.3%
- g. Meningkatnya volume sampah yang dikelola dari 1.752.000 Ton (2008) menjadi 1.898.000 ton (2009)
- h. Terangkutnya sampah di jl.warung buncit 5.840 Ton dan Keb.Lama 1.380 Ton

4. Urusan Perumahan Rakyat

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan perumahan rakyat antara lain:

a. Program penyediaan perumahan rakyat

- Penyelesaian pembangunan Rusun Marunda Cluster B Blok 1 & 2.
- Penyelesaian pembangunan Rusun Marunda Cluster B Blok 3 & 6.
- Penyelesaian pembangunan Rusun Cakung Barat Blok 1 & 2.
- Penyelesaian pembangunan Rusun Pinus Elok lokasi A Blok 1 & 2.
- Penyelesaian pembangunan Rusun Pinus Elok lokasi B Blok 1.
- Penyelesaian pembangunan Rusun Pinus Elok lokasi B Blok 2.
- Pembangunan dan perencanaan Rusun Pulo Gebang Blok 1.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perumahan rakyat antara lain:

- a. Berfungsinya 950 Unit rumah susun, yaitu Cakung Barat 2 Blok 150 Unit, Pinus Elok 4 Blok 400 Unit, dan Marunda 4 Blok 400 Unit.
- b. Berfungsinya gedung pemerintahan dan layanan publik.

5. Urusan Penataan Ruang

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan perumahan rakyat antara lain:

a. Penataan dan pengawasan bangunan,

- Terlaksananya penertiban pembongkaran 1013 bangunan yang melanggar ketentuan

- Terlaksananya inspeksi terpadu pelaksanaan pembangunan untuk bangunan dengan luas >1500m².

b. Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang

- Tersedianya KDO roda 4.
- Tersedianya KDO roda 2.
- Tersedianya peralatan bongkar dan pemeliharaan/penggantian suku cadang KDO, Belanja BBM.

c. Program Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

- Tersusunnya Raperda tentang Peraturan Zonasi (zoning text dan zoning code).
- Tersusunnya Draf RTRW Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Selatan.
- Beroperasinya tim pertimbangan penataan ruang.
- Tersusunnya masterplan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda dan masterplan Koridor Banjir Kanal Timur (BKT).

d. Program pemberdayaan komunitas penataan ruang,

- Tersedianya jasa 48 Orang tenaga ahli Tim Penasehat Teknis Arsitektur Perkotaan dan Bangunan (TPTAPB) (Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), Tim Penasehat Konstruksi Bangunan (TPKB), dan Tim Penasehat Instalasi Bangunan (TPIB).

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan penataan ruang antara lain:

- a. Bertambahnya kecamatan yang memperoleh ISO untuk pelayanan tata kota di 44 Kecamatan dan 5 Suku dinas, sehingga sampai dengan 2009 unit pelayanan tata kota yang memperoleh ISO menjadi 15 kecamatan dan 5 Suku dinas.
- b. Bertambahnya kecamatan yang memperoleh ISO bidang pelayanan IMB pada 44 kecamatan, 5 suku dinas, dan 1 Dinas sehingga sampai

dengan 2009 unit pelayanan perijinan yang memperoleh ISO menjadi 15 kecamatan, 5 Suku dinas, dan 1 Dinas

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan antara lain:

a. Program perencanaan pembangunan perekonomian,

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan perekonomian pada 60 SKPD
- Tersusunnya Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RKED) tahun 2010.
- Terlaksananya koordinasi kegiatan tahun jamak bidang Ekonomi

b. Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat,

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan kesmas sebanyak 61 SKPD.
- Terlaksananya koordinasi perencanaan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan.
- Terlaksananya koordinasi kegiatan tahun jamak bidang Kesmas

c. Perencanaan pembangunan sarana prasarana kota,

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan PSKLH sebanyak 9 SKPD.
- Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana prasarana pengendalian banjir dan pembangunan rusunawa

- Terlaksananya koordinasi kegiatan tahun jamak bidang PSKLH

d. Perencanaan pembangunan lingkungan hidup,

- Terlaksananya koordinasi perencanaan pengelolaan persampahan.

e. Perencanaan pembangunan tata praja,

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan Tata Praja dan Aparatur sebanyak 21 SKPD.
- Terlaksananya koordinasi perencanaan kecamatan dan kelurahan, penanggulangan bencana, pembangunan aparatur, pokja sosial ekonomi dan lingkungan hidup Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP).
- Terlaksananya koordinasi kegiatan tahun jamak bidang tata praja dan aparatur.

f. Perencanaan pembangunan aparatur,

- Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan aparatur

g. Pengelolaan data perencanaan pembangunan,

- Tersusunnya buku saku tahun 2009 sebanyak 2.600 buku
- Tersusunnya buku info eksekutif tahun 2009
- Tersusunnya data/informasi statistik daerah
- Tersusunnya dokumen metadata untuk JDSN.

h. Pengelolaan perencanaan pembangunan daerah,

- Tersusunnya draft Perda tentang tatacara penyusunan perencanaan pembangunan daerah,
- Tersusunnya LKPJ tahun 2008,

- Terselenggaranya Musrenbang
- Tersusunnya review RPJMD provinsi DKI Jakarta dan finalisasi Raperda RPJPD provinsi DKI Jakarta,
- Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2010.
- Tersusunnya Nota Kesepakatan KUA Perubahan tahun 2009 nomor 609/-1.713.6 tahun 2009 dan 5/2009 tanggal 10 Juli 2009
- Tersusunnya Nota Kesepakatan PPA Perubahan tahun 2009 nomor 24 tahun 2009 dan 1392/-078.2 tanggal 26 Nopember 2009
- Tersusunnya Nota Kesepakatan KUA tahun 2010 nomor 24 tahun 2009 dan 1391/-078.2 tanggal 26 Nopember 2009
- Tersusunnya Nota Kesepakatan PPA tahun 2010 nomor 25 tahun 2009 dan 1392/-078.2 tanggal 26 Nopember 2009,
- Terselenggaranya Konreg PDRB Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perencanaan pembangunan antara lain:

- a. Disampaikannya LKPJ sesuai ketentuan
- b. Ditetapkannya RKPD 2010 sesuai ketentuan
- c. Disampaikannya RAPBD-P 2009 kepada DPRD sesuai ketentuan
- d. Disampaikannya RAPBD 2011 kepada DPRD sesuai ketentuan

7. Urusan Perhubungan

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan perhubungan antara lain:

a. Program peningkatan pengelolaan terminal bis antar kota

- Renovasi bangunan terminal bis Senen dan p.Pemeliharaan emplasemen terminal bis Senen dengan luas 8.232 m2.

b. Program pembangunan fasilitas perhubungan

- Beroperasinya 34 bis sekolah.
- Tersedianya jalur sepeda motor sepanjang 32,5 km
- Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan lampu lalu lintas di 320 simpang
- Terlaksananya perbaikan/penggantian controller 41 unit lampu lalu lintas
- Terlaksananya pengadaan/penggantian kabel tanah lampu lalu lintas sepanjang 75.337 m.

c. Program peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan sertifikasi perangkat telekomunikasi

- Tersedianya 1 unit alat uji statis, 8 unit alat uji emisi kendaraan bermotor, 3 unit mobil pengujian kendaraan bermotor keliling dan buku uji sebanyak 264.517 buku

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perencanaan pembangunan antara lain:

- a. Meningkatnya jumlah penumpang busway dari 74,6 Juta penumpang (2008) menjadi 83,2 juta (2009)
- b. Meningkatnya luas emplasemen Terminal Bus Senen yang dapat dimanfaatkan untuk kelancaran sirkulasi
- c. Bertambahnya jumlah pelajar yang terangkut hingga mencapai 3.154 pelajar/bis/hari;
- d. Meningkatnya fungsi simpang.
- e. Tersedianya jalur sepeda motor.

- f. Meningkatnya kemampuan pelayanan uji semula 80-100 kendaraan/hari menjadi 130-150 kendaraan/hari.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan lingkungan hidup antara lain:

a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,

- Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pantura Teluk Jakarta.
- Terlaksananya pemantauan kualitas perairan dan muara Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu.
- Terlaksananya penilaian 154 dokumen AMDAL.

b. Program rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam,

- Terlaksananya pengelolaan limbah sampah organik dan non organik sebanyak 1.500 ton.
- Terlaksananya pengadaan bangku taman sebanyak 30 buah.
- Terlaksananya pengadaan tong sampah sebanyak 103 buah.
- Terlaksananya kampanye 3 kali kolam resapan, sumur resapan dan lubang resapan biopori di Provinsi DKI Jakarta.
- Terlaksananya penerapan program Menuju Indonesia Hijau (MIH) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Terlaksananya pencatatan meter air pelanggan air tanah.
- Tersedianya pengadaan telemetri untuk meter air.

- Tersedianya pengadaan alat pendeteksi kedalaman sumur bor (bore hole camera).
- Terlaksananya pengawasan dan penertiban pemanfaatan air bawah tanah.
- Tersedianya pengadaan dan pemasangan telemetri di sumur pantau.

c. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

- Bertambahnya bengkel uji emisi yang disertifikasi dari 238 (2008) menjadi 258 (2009) dan teknisi uji emisi dari 568 (2008) menjadi 608 (2009)
- Terlaksananya gerakan hemat air di provinsi DKI Jakarta dalam rangka Hari Air Dunia.
- Terlaksananya penataan kampung ramah lingkungan.
- Terlaksananya pameran pembangunan berkelanjutan.

d. Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau,

- Terlaksananya pembebasan lahan untuk hutan kota Kelurahan Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur seluas 2,11 Ha, Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan seluas 2,02 Ha.
- Terlaksananya penanaman pohon produktif sebanyak 5.150 pohon.
- Terlaksananya 5 kali gerakan pemberdayaan penghijauan pohon pelindung.
- Terlaksananya pemeliharaan penghijauan pohon pelindung dan hutan kota.
- Terlaksananya pembangunan fasilitas sarana prasarana hutan kota Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan berupa pintu gerbang dan kantor pengelola.

- Terlaksananya pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau di Taman Margasatwa Ragunan seluas 113.510,37 m².
- Terlaksananya penataan taman di areal kandang PPS seluas 153.261 m².
- Terlaksananya penanaman 2.673 Pohon Salak sebagai barier pagar batas Taman Margasatwa Ragunan.
- Terlaksananya penanaman 1.000 pohon di koridor BKT.

e. Program konservasi flora fauna,

- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana arboretum mangrove berupa gapura dan jalan kontrol sepanjang 36 m.
- Terlaksananya pembangunan jalan kontrol hutan lindung Angke Kapuk dan shelter sepanjang 80 m dan pembuatan gapura.

f. Program peningkatan pengelolaan pemakaman,

- Tersedianya pemetaan status lahan pemakaman di lokasi TPU seluruh wilayah kota administrasi.

g. Program peningkatan kapasitas pemakaman

- Terlaksananya pematangan 10,96 Ha lahan TPU di TPU Semper, TPU Bulak Turi, TPU Tegal Alur, TPU Pegadungan dan TPU Kepa Duri, TPU Tanah Kusir, Kampung Kandang, Srengseng Sawah dan Jeruk Purut, Petamburan
- Terlaksananya pembebasan 11,04 Ha tanah untuk TPU Rorotan Jakarta Utara, Pembuatan dan pemasangan plaket Makam TPU Karet Biivak.

h. Program peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup,

- Tersedianya peralatan uji laboratorium dan sarana penunjang laboratorium.
- Terlaksananya pengamanan kantor BPLHD Provinsi DKI Jakarta.
- Tersedianya bahan kimia (reagent) dan gas serta Standard Reference Material (SRM).
- Terpeliharanya & operasionalisasi sarana apung.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan lingkungan hidup antara lain:

- a. Menurunnya tingkat pencemaran udara untuk parameter PM10: 40%, CO: 70%, NO: 80% di kawasan HBKB
- b. Bertambahnya kegiatan/usaha yang mendapatkan surat kelayakan lingkungan hidup sebanyak 122 Kegiatan/usaha dan yang memiliki IPLC sebanyak 57 Kegiatan/usaha.
- c. Bertambahnya kegiatan/usaha yang memenuhi BMLC dari 250 (2008) menjadi 400 (2009), yang sudah mengelola limbah B3 nya dari 120 industri (2008) menjadi 144 industri (2009).
- d. Bertambahnya kawasan permukiman yang bersih, asri dan hijau dari 25 RW menjadi 50 RW
- e. Bertambahnya jumlah kendaraan yang lulus uji emisi dari 26.296 pada tahun 2008 menjadi 100.000 pada tahun 2009.
- f. Bertambahnya lokasi penerapan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) dari 237 lokasi pada tahun 2008 menjadi 387 lokasi pada tahun 2009.
- g. Bertambahnya periode pemantauan kualitas udara roadside dari 17 periode menjadi 22 periode.
- h. Menurunnya tingkat pencemaran udara untuk parameter PM10: 40%, CO: 70%, NO: 80% di kawasan HBKB
- i. Bertambahnya masyarakat yang memahami pengelolaan limbah padat (sampah) dari 300 orang tahun 2008 menjadi 500 orang tahun 2009.

- j. Bertambahnya lubang resapan biopori dari 500 buah tahun 2008 menjadi 5 juta buah tahun 2009.
- k. Bertambahnya persentase luasan konservasi mangrove dan terumbu karang sebesar 20% dari tahun 2008.

9. Urusan Pertanahan

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan pertanahan antara lain:

a. Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T),

- Tersedianya otomasi data P 4 T.
- Terlaksananya inventarisasi bidang-bidang tanah di daerah perbatasan Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten.
- Tersedianya pemutakhiran peta dasar skala 1:1000 wilayah Jakarta Selatan, Pusat, dan Utara.

b. Program pengembangan geoinformasi dan georeferensi sebagai pendukung program lintas sektor dan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN),

- Tersedianya aplikasi GIS untuk perencanaan dan monitoring pembangunan daerah DKI Jakarta secara terpadu berbasis WEB GIS.
- Terlaksananya pembangunan sistem informasi peta dasar DKI Jakarta.
- Tersedianya pembuatan informasi pemetaan sarana dan prasarana kesehatan.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pertanahan antara lain:

- a. Tersedianya pemutakhiran peta dasar skala 1:1000 wilayah Jakarta Selatan, Pusat, dan Utara.
- b. Tersedianya aplikasi GIS untuk perencanaan dan *monitoring* pembangunan daerah DKI Jakarta secara terpadu berbasis WEB GIS.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain:

a. Pengawasan dan penegakan peraturan kependudukan

- Terlaksananya penertiban terhadap 800 KTP ganda
- Terlaksananya penyelesaian 11 kasus sengketa kependudukan.
- Terlaksananya penertiban dokumen adminduk terhadap orang asing pada 78 lokasi dan terdata 616 orang asing.
- Terlaksananya pemantauan operasi yustisi kependudukan pada 33 lokasi, dan terjaring 4.461 orang, disidangkan 3.177 orang dan dibawa ke panti sosial 94 orang.
- Terdatanya jumlah penduduk pendatang (migrasi masuk) pasca lebaran sebanyak 69.554 orang.
- Tersusunnya Rapergub juklak dan juknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan Draft Revisi Raperda 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

b. Peningkatan mutu layanan kependudukan dan catatan sipil,

- Berfungsinya website Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta: www.kependudukancapil.go.id
- Tersedianya 6 mobil operasional layanan KTP secara mobile.
- Terlaksananya pelaksanaan pencatatan perkawinan luar balai sebanyak 6.305 pasang.
- Terlaksananya verifikasi dan validasi database hasil pendataan F1.01 sebanyak 63.171 jiwa dari 76.144 jiwa yang ditujukan pada 27 kelurahan percontohan pada 5 kecamatan masing-masing di lima wilayah.
- Terlaksananya entry (verifikasi) pendataan penduduk f1.01 (lanjutan) sebanyak 78% atau 1.448.094 form f1.01 dari 1.850.378 sehingga sampai dengan tahun 2009 telah di entry data sebanyak 5.292.875 dari 6.822.145 jiwa.

c. Program peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan,

- Terlaksananya pemindahan penataan arsip register akta capil sebanyak 29.080 buku dan arsip register akta capil sebanyak 73.000 buku.
- Tersusunnya program kerjasama daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan 10 anggota Mitra Praja Utama.
- Tersusunnya penyempurnaan Keputusan Gubernur tentang Tim Sipora serta terselenggaranya koordinasi pengawasan orang asing.
- Tersusunnya penyempurnaan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengendalian Urbanisasi serta terselenggaranya Koordinasi Pengendalian Mobilitas Penduduk/Migrasi masuk antara instansi terkait.

- Terlaksananya sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih (DPT/DPS) serta *monitoring* bimbingan teknis petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas RT/RW tingkat kelurahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

d. Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),

- Tersedianya perangkat LAN pada 42 kecamatan dan 261 kelurahan
- Terkoneksinya jaringan pelayanan adminduk secara on line pada 261 kelurahan
- Pembangunan aplikasi pendaftaran pendataan orang asing untuk layanan adminduk khusus WNA.
- Instal database SIAK untuk pelayanan off-line administrasi kependudukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Terbangunnya aplikasi penduduk rentan untuk proses pendataan penduduk rentan.
- Terbangunnya pelayanan kependudukan melalui SIAK
- Terlaksananya Diklat SIAK bagi 100 orang petugas pelayanan masyarakat.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain:

- a. Terlayannya 25.658 KTP dan 22.854 KK melalui SIAK
- b. Terlayannya penerbitan 270 KTP melalui mobil keliling (sd. Maret 2010 4.955 KTP)
- c. Kepemilikan KTP meningkat dari 95,73% (2008) menjadi 96.50% (2009).
- d. Kepemilikan KK Komputer meningkat dari 80% (2008) menjadi 85% (2009)

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

a. Program kebijakan tentang keserasian peningkatan kualitas anak dan perempuan,

- Terlaksananya workshop penghapusan kekerasan terhadap anak.

b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak,

- Terlaksananya pelatihan kemampuan pengurus lembaga pemberdayaan perempuan sebanyak 130 pengurus.
- Terlaksananya orientasi perlindungan anak terhadap tindak kekerasan di lingkungan sekolah bagi guru Bimbingan Konseling (BK) sebanyak 123 guru.
- Terlaksananya workshop pemberdayaan perempuan bagi para ustadz dan ustadzah yang diikuti oleh 146 peserta.
- Terlaksananya orientasi perlindungan perempuan dan anak bagi PKB yang diikuti oleh 125 orang.
- Terselenggaranya lomba GSI tingkat provinsi.

c. Program pemberdayaan perempuan dalam ekonomi keluarga dan masyarakat,

- Terselenggaranya Lomba P2WKSS tingkat Provinsi DKI Jakarta.

- Terselenggaranya orientasi pemberdayaan perempuan bagi TP PKK kelurahan sebanyak 267 Orang.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

- a. Berkembangnya organisasi perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari 24 organisasi (2008) menjadi 63 organisasi (2009);
- b. Berkembangnya kelompok ekonomi perempuan yang produktif dan mandiri dari 620 kelompok (2008) menjadi 662 kelompok (2009).

12. Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain:

a. Program Keluarga Berencana,

- Terselenggaranya penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan/Bhayangkara Tingkat Provinsi dengan 7 Sektor terkait.
- Terselenggaranya pelayanan KB momentum di 6 kota/kabupaten dan KB melalui mobil unit KB keliling ke 93 lokasi dengan jumlah akseptor sebanyak 7.705 PUS
- Terselenggaranya pemantapan komitmen teknis medis pelayanan KB kepada 150 provider.
- Terselenggaranya pertemuan rakortek pelayanan KB pasca persalinan yang diikuti oleh 75 orang

- Terselenggaranya penggalangan komitmen pelayanan KB Mandiri kepada 75 orang, dan kesepakatan KB pria yang diikuti oleh 150 peserta.
- Terselenggaranya pelayanan pusat rujukan KB pria.
- Terselenggaranya semiloka KB pria yang diikuti oleh 120 Orang.

b. Program kesehatan reproduksi remaja,

- Terselenggaranya dialog interaktif melalui radio sebanyak 2 kali.
- Terselenggaranya advokasi dan KIE kesehatan reproduksi remaja kepada 180 Tokoh Agama.
- Terselenggaranya gebyar kreativitas kesehatan reproduksi remaja yang diikuti oleh 600 remaja.

c. Program pelayanan kontrasepsi,

- Terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta KB baru.
- Terlaksananya distribusi alat kontersepsi (alkon) dan non alkon di 5 wilayah kota administrasi.
- Terlaksananya pelayanan kontrasepsi mantap bagi 716 pria dan 1.775 wanita di 6 kota/kab. administrasi.
- Terlaksananya pelayanan di 6 kota/kab. Administrasi untuk KB Implant 10.832 orang, IUD 27.627 orang, Suntik 183.606 orang, PIL 113.592 orang dan kondom 25.730 orang.

d. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling remaja,

- Terselenggaranya pengembangan PIK KRR jalur masyarakat sebanyak 5 PIK dan pelayanan KIE PIK KRR di 157 PIK (152 PIK sekolah dan 5 PIK jalur organisasi/masyarakat).

e. Program peningkatan pengetahuan keluarga tentang penyakit menular seksual,

- Terselenggaranya penggalangan kesepakatan PMTCT kepada 15 organisasi kemasyarakatan.
- Terselenggaranya dialog interaktif HIV/AIDS, narkoba melalui radio sebanyak 2 kali.

f. Pengembangan model operasional BKB - Posyandu-PAUD,

- Terselenggaranya kemitraan BKB dan posyandu di 93 kelurahan.
- Beroperasinya BKB-Posyandu di 6 kota/kabupaten administrasi.
- Terlaksananya monitoring terhadap 55 posyandu untuk pelayanan KB di posyandu di 6 kota/kabupaten administrasi sebanyak.
- Terpilihnya pengelola kelompok BKB terbaik sebanyak 6 Kader.
- Terlatihnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga bagi petugas dan kader sebanyak 180 Kader.

g. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

- Terselenggaranya pemilihan Penyuluh KB (PKB) dan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP/PPKB RW) terbaik sebanyak 6 PKB/PPKB RW.

- Terselenggaranya penggalangan Kesepakatan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA) dengan organisasi kemasyarakatan/wanita/keagamaan yang diikuti oleh 100 Orang.
- Terlayaninya perlindungan hak-hak reproduksi individu kepada 300 orang.
- Terlatihnya petugas Pendamping Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMPKR) dan KHIBA sebanyak 60 Petugas.

h. Program pelaksanaan SPM lain urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

- Terselenggaranya lokakarya pemasaran produk kelompok UPPKS yang diikuti oleh 102 orang.
- Terselenggaranya penggalangan kemitraan dan gelar produk kelompok UPPKS bagi 104 Kelompok.
- Terselenggaranya dialog pemasaran kelompok UPPKS melalui radio sebanyak 2 Kali.
- Terlaksananya dialog interaktif di 2 radio swasta
- Terpilihnya pengelola kelompok UPPKS terbaik sebanyak 6 pengelola.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain:

- a. Meningkatnya kelangsungan pemakaian alat dan obat kontrasepsi pasangan usia subur dari 80.79% (2008) menjadi 82.03% (2009).
- b. Mempertahankan *total fertility rate* (TFR) sebesar 2,1% (Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007)
- c. Metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik, kondom) dari 646.373 peserta (2008) menjadi 670.309 peserta (2009).

- d. Metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP, Implan) dari 335.848 peserta (2008) turun menjadi 324.146 peserta (2009).
- e. Keluarga yang aktif dalam kegiatan BKB dan Posyandu dari 26.176 Keluarga (2008) menjadi 35.535 Keluarga (2009).
- f. Peran serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) RW dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dari sebesar 12.36% (2008) menjadi 55.73% (2009).

13. Urusan Sosial

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan sosial antara lain:

a. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

- Terlaksananya penertiban sosial PMKS jalanan sebanyak 5.000 orang (2008) dan 11.338 orang (2009).
- Terselenggaranya pelayanan sosial orang terlantar dan korban tindak kekerasan 5.100 orang (2008) dan 3.869 orang (2009)
- Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana 90 tenda pleton dan 700 velbed (2008) dan 148 perahu karet/galon dan 125 tenda dapur (2009).
- Terlaksananya pemberian makanan siap saji bagi korban bencana sebanyak 1.500.000 box.
- Terlaksananya pelatihan taruna siaga bencana sebanyak 100 orang.
- Terlaksananya perlindungan sosial kepada Lanjut Usia (Lansia) sebanyak 150 orang (2008) dan 400 orang (2009).

- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia sebanyak 910 orang (2008) dan 912 orang (2009).
- Terlaksananya penguatan kemandirian lansia sebanyak 200 orang pada tahun 2009, tahun 2008 tidak ada.
- Terlaksananya penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) TK Provinsi sebanyak 1.000 orang (2008) menjadi 1.284 orang (2009).
- Terlaksananya kegiatan apresiasi kompetisi penyandang cacat Tingkat provinsi sebanyak 220 orang (2008) dan 220 orang (2009).
- Terlaksananya penyaluran sosial PMKS jalanan hasil penertiban ke daerah asalnya 600 orang (2008) dan 1.200 orang (2009).
- Terlaksananya kegiatan silaturahmi gubernur dengan para perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan dan pejuang lainnya sebanyak 200 orang (2008) dan 475 orang (2009).
- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)/Non Panti Sosial Asuhan Anak (NPSAA), 1821 orang (tahun 2008) dan 1.500 orang (tahun 2009).
- Tersedianya dokumen kajian aksesibilitas penyandang cacat di DKI Jakarta.
- Terlaksananya kegiatan pemberian santunan sosial bagi penyandang cacat 60 orang (2008) dan 1.000 orang (2009).
- Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan perawatan WBS psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung 25 orang (2008) dan 50 orang (2009).
- Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi sosial WBS di 25 panti.

- Terlaksananya peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tingkat Nasional.
- Terlaksananya perlindungan sosial kepada anak terlantar dan anak jalanan 2.130 orang (2008) dan 800 orang (2009).
- Terselenggaranya pembinaan penguatan kemandirian sosial (praktek kerja bekas hukuman) 50 orang (tahun 2008) dan 15 orang (tahun 2009).
- Terlaksananya penguatan dan pengembangan KUBE bekas hukuman sebanyak 30 anak (tahun 2009).

b. Program pembinaan peran serta lembaga kesejahteraan sosial,

- Terlaksananya pembinaan kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan orsos dalam peningkatan pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) sebanyak 50 orang (2008) dan 120 orang (2009).
- Terlaksananya operasional pokja kesuma dalam rangka pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) kepada masyarakat 267 Kelurahan (tahun 2008) dan 267 Kelurahan (tahun 2009).
- Terlaksananya operasional karang taruna, provinsi, kota administrasi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan kepada 273 karang taruna (2008) dan 317 karang taruna (2009).
- Terlaksananya pembuatan dan penayangan tentang Binal dan Kesos sebanyak 4 tayangan (semi dokumenter, sinetron lepas, reality show, dan talk show).
- Terlaksananya penguatan kinerja tenaga pendamping penyelenggara pelayanan Kesos anak, remaja, keluarga dan lansia sebanyak 300 orang (2008) dan 60 orang (2009).

c. Program pembinaan lembaga mental spiritual,

- Terlaksananya pelayanan dan peningkatan pelayanan jamaah haji provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci sebanyak 7281 orang (2008) dan 7478 (2009).

d. Program peningkatan sarana dan prasarana sosial,

- Terlaksananya rehab rehab total gedung PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng dan rehab berat gedung aula, rumah dinas PSBN Cahaya Bathin.
- Terlaksananya rehab PSAA Putra Utama 2 Plumpang, LBK Duren Sawit, PSBK Harapan Jaya Balaraja, PSAA Putra Utama 1 Klender,
- Terlaksananya pengadaan mobil operasional khusus sebanyak 36 mobil tahun 2009 (10 mobil penjemputan PMKS, 20 mobil pelayanan WBS di panti sosial, dan 6 mobil penyuluhan sosial di masyarakat).

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan sosial antara lain:

- a. Meningkatnya jumlah penyandang cacat yang dapat beraktivitas dengan lancar dari 105 orang (2008) menjadi 129 orang (2009).
- b. Jumlah anak terlantar yang dapat dipenuhi kebutuhan dasarnya dari 1.821 orang (2008) menjadi 1.500 orang (2009) dan yang dapat ditampung di panti sosial dari 2.130 orang (2008) dan 2.130 orang (2009).
- c. Meningkatnya keluarga miskin yang dapat hidup mandiri sebanyak 150 keluarga (2008) menjadi 175 keluarga (2009).
- d. Meningkatnya jumlah lanjut usia yang dapat dilayani sebanyak 910 orang (2008) menjadi 1.112 orang (2009).
- e. Jumlah korban bencana yang dapat terlayani kebutuhan makan selama di pengungsian sebanyak 214.000 orang.

- f. *Respon time* penanganan bencana di DKI Jakarta oleh Dinas Sosial 12 jam (2008) dan 6 jam (2009).
- g. Jumlah PMKS jalanan yang tidak kembali ke jalan sebanyak 5.000 orang.
- h. Jumlah WBS panti sosial yang dapat hidup mandiri setelah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial di panti sosial sebanyak 467 orang.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ketenagakerjaan antara lain:

a. Program peningkatan kesempatan kerja,

- Terlaksananya pengisian lowongan kerja pada perusahaan sebanyak 600 orang.
- Terlaksananya penempatan tenaga kerja asal DKI ke luar negeri (Taiwan) sebanyak 50 orang.
- Terselenggaranya Bursa Kerja On Line melalui Job Fair (di Thamrin City dan Universitas Trisakti) yang dikunjungi oleh 10.000 pencari kerja dengan 2.386 pencari kerja yang tersalur/ditempatkan.
- Terlaksananya perluasan kerja melalui pembentukan Tenaga Kerja Mandiri, Wira Usaha Baru, penerapan Teknologi Tepat Guna sebanyak 1.770 orang.
- Tersalurkannya jumlah penganggur terbuka di perusahaan formal dan informal sebanyak 7.109 orang.

- Terlaksananya penempatan penganggur terbuka oleh Lembaga Pengelola/Penempatan Tenaga Kerja sebanyak 600 lembaga
- Tersedianya koneksi akses informasi ketenagakerjaan melalui internet di 13 titik lokasi.
- Meningkatnya jumlah paket informasi ketenagakerjaan sebanyak 12.000 paket yang dipublikasikan kepada masyarakat.

b. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan,

- Terlaksananya pembinaan perusahaan mengantisipasi penanganan mogok kerja sebanyak 30 perusahaan.
- Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 40 kasus.
- Terlaksananya pembinaan perlindungan kerja pada 300 perusahaan.
- Terlaksananya pembinaan norma kerja pada perusahaan sebanyak 550 perusahaan.
- Terlaksananya pembinaan K3 pada 360 perusahaan.

c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

- Terselenggaranya pelatihan keterampilan kerja dengan 20 kejuruan (di antaranya pelatihan las pipa, las plat, las bawah air, otomotif roda 2, otomotif roda 4, pelatihan teknik informatika) sebanyak 4.145 orang.
- Terselenggaranya uji sertifikasi kompetensi lulusan BLK, di antaranya kejuruan las plat, otomotif, mesin logam, teknik pendingin, sebanyak 410 orang.

- Terlaksananya pelatihan pra pemberangkatan bagi peserta program magang IMM ke Jepang sebanyak 400 orang.
- Terlaksananya pemasaran dalam rangka penempatan lulusan BLK sebanyak 4.145 orang dan dapat ditempatkan sebanyak 2.901 orang.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan ketenagakerjaan antara lain:

- a. Tingkat penganggur terbuka mengalami penurunan pada tahun 2008 mencapai 12,16 % menjadi 12,15 % pada tahun 2009.
- b. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi melalui program asuransi pada perusahaan di DKI Jakarta sebanyak 39.247 perusahaan pada tahun 2008 menjadi 43.762 perusahaan pada tahun 2009.
- c. Meningkatnya standar Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp. 1.069.685,- pada tahun 2009 menjadi Rp 1.118.009,- pada tahun 2010.
- d. Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil (lulusan BLK) yang siap memasuki dunia kerja sebanyak 3.636 orang pada tahun 2008 menjadi 4.145 orang pada tahun 2009.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah antara lain:

- a. **Program Pembinaan dan pengembangan lembaga Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,**
 - Terlaksananya peningkatan kelembagaan dan usaha 100 koperasi.

- Terlaksananya pemeringkatan terhadap 150 Koperasi.
- Terlaksananya revitalisasi kelembagaan terhadap 10 KSU dan 10 Koppas.
- Terlaksananya pembinaan dan pengembangan 150 Anggota Koperasi Sekolah.
- Terfasilitasinya akses permodalan terhadap 100 KSP/USP.

b. Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah,

- Terdatanya peningkatan penjualan souvenir pada 7 kios UKM.
- Terlaksananya pameran dan promosi UKM 10 event.
- Terselenggaranya gelar pasar rakyat sebanyak 2 kali.
- Meningkatnya akses koperasi dan UKM terhadap sumber dana, pasar dan teknologi.
- Terlaksananya penilaian UKM berprestasi tingkat provinsi sebanyak 100 UKM.
- Terlaksananya work shop kiat bisnis usaha mikro dan kecil.
- Terlaksananya jaringan pemasaran UKM dalam negeri dan luar negeri sebanyak 100 UKM.
- Terfasilitasinya peminjaman permodalan ke lembaga keuangan bank dan non bank sebanyak 160 orang.

c. Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan UKM,

- Terlaksananya perencanaan pembangunan lokasi binaan Rawa Buaya sebanyak 1 lokasi.
- Terlaksananya penataan lokasi sementara PKL di 5 wilayah kota administrasi.
- Terlaksananya kerjasama UKM antar provinsi.

- Terlaksananya pembinaan mutu produk UKM makanan dan minuman.

d. Program peningkatan mutu perizinan KUKM,

- Terlaksananya verifikasi terhadap 120 Badan Hukum Koperasi.
- Terlaksananya peningkatan SDM Badan Hukum Koperasi terhadap 120 orang.
- Terlaksananya peningkatan Badan Hukum Koperasi kepada 150 orang.
- Terlaksananya peningkatan kelembagaan pra koperasi terhadap 50 Badan Hukum Koperasi.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah antara lain:

- a. Meningkatnya jaringan pemasaran UKM dalam dan luar negeri dari 75 UKM (2008) menjadi 100 UKM (2009)
- b. Meningkatnya permodalan pada 160 KUKM melalui perbankan baik pola konvensional maupun pola syariah.
- c. Meningkatnya jumlah partisipan pelaku usaha dari 160 UKM (2008) menjadi 200 UKM (2009).
- d. Meningkatnya produk UKM yang bersertifikat halal dari 12 jenis produk (2008) menjadi 20 jenis produk UKM (2009).
- e. Meningkatnya jumlah koperasi yang direvitalisasi dari 16 koperasi (2008) menjadi 20 koperasi (2009)
- f. Terasilitasinya akses permodalan terhadap 100 KSP/USP.

16. Urusan Penanaman Modal

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan

kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan penanaman modal antara lain:

a. Program peningkatan investasi,

- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian persetujuan penanaman modal.
- Terlaksananya implementasi lingkungan dalam pelaksanaan penanaman modal.
- Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal antar wilayah Provinsi DKI Jakarta di mana Provinsi DKI Jakarta menjadi tuan rumah untuk 3 event.
- Tertanganinya permasalahan penanaman modal di Jakarta melalui task force.
- Beroperasinya Jakarta Investment Center di 5 kota manca negara (Jakarta, Singapura, Melbourne, Hongkong, dan Taipei).
- Terlaksananya penahapan operasional pelayanan terpadu satu pintu.

b. Program peningkatan promosi investasi,

- Terinformasikannya peluang investasi dan kondisi perekonomian Jakarta dan Indonesia melalui promosi dalam dan luar negeri serta business forum maupun Pekan Raya Jakarta.
- Terlaksananya kerjasama investasi dengan daerah sekitar terutama dalam perencanaan dan promosi.
- Terlaksananya informasi kepada masyarakat tentang peluang investasi melalui media bahan promosi dan media elektronik.

c. Program peningkatan sarana dan prasarana penanaman modal

- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kantor SKPD.
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang telah ada.

d. Program peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah,

- Tersedianya hasil evaluasi RKAP BUMD.
- Tersedianya calon pengurus BUMD yang diseleksi melalui fit and proper test.
- Terlaksananya monitoring, pembinaan, pengendalian dan pengembangan BUMD serta pembinaan terhadap pengurus BUMD.
- Meningkatnya pengetahuan pengurus BUMD sehingga akan terjadi ketepatan dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tersedianya kajian tentang kesiapan BUMD untuk go publik.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan penanaman modal antara lain:

- a. Terealisasinya PMA sebesar US\$ 5,510,49 ribu dengan jumlah proyek 433.
- b. Meningkatnya realisasi PMDN dari Rp 1.751.280,30 (juta) dengan jumlah proyek 33 dan (2008) menjadi Rp 9,693,818.17 (juta) dengan jumlah proyek 35 (2009).
- c. Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD dari Rp 158.282.194.763,- (2008) menjadi Rp 178.532.488.876,- (2009)
- d. Tercapainya 2 Memorandum of Agreement (MoA) antara PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT. KBN) dengan PT. Tainan Indonesia dan PT. Winners Trend; Pernyataan minat dari 9 perusahaan, dan Permintaan informasi lebih detail dari 27 perusahaan.
- e. Tercapainya penyelesaian waktu perizinan penanaman modal paling lama 38 hari kerja.

17. Urusan Kebudayaan

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan kebudayaan antara lain:

a. Program pengelolaan keragaman budaya,

- Terlaksananya promosi seni budaya dan permuseuman sebanyak 40 kegiatan tingkat daerah, 20 kegiatan tingkat nasional dan 8 kegiatan tingkat internasional.
- Terlaksananya pagelaran seni budaya tingkat daerah sebanyak 350 pagelaran, tingkat nasional sebanyak 20 pagelaran dan tingkat internasional sebanyak 8 pagelaran.
- Terlaksananya pembinaan terhadap 46 lembaga/wadah organisasi budaya dan 640 sanggar kesenian.

b. Program pengelolaan kekayaan budaya,

- Terlaksananya pengembangan gedung Teater Besar PKJ-TIM dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 1.490 kursi penonton.
- Terlaksananya pemeliharaan gedung Balai Latihan Kesenian Jakarta Utara, dengan kapasitas 350 kursi penonton.
- Terlaksananya konservasi bangunan cagar budaya sebanyak 6 bangunan cagar budaya (gedung Museum Tekstil, gedung Kesenian Jakarta, gedung Museum Wayang, gedung Museum Joang'45, gedung Museum MH. Thamrin dan gedung Balai Konservasi).

- Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan cagar budaya di kawasan Kota Tua sebagai destinasi wisata budaya.

c. Program pengembangan nilai budaya,

- Terlaksananya eksperimentasi Teater Betawi sebanyak 150 orang.
- Terlaksananya pendataan legenda masyarakat Betawi sebanyak 1 dokumen.
- Terlaksananya penulisan sejarah kerajaan Tanjung Jaya.
- Terlaksananya pemberian penghargaan terhadap 22 orang pelaku budaya.
- Terlaksananya sertifikasi perizinan, rekomendasi bidang seni budaya dan permuseuman sebanyak 35 sertifikat.
- Terlaksananya pembinaan kesenian tradisional Betawi sebanyak 5 jenis/160 sanggar seni budaya.
- Terlaksananya pelatihan di 5 (lima) balai latihan kesenian sebanyak 690 orang/pelaku seni budaya.
- Meningkatnya jumlah kunjungan pelajar ke museum-museum sebanyak 1.350 pelajar.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan Kebudayaan antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitasi terhadap masyarakat/pelaku seni budaya dalam partisipasi pentas seni di ruang publik, dari 52.025 orang pelaku seni (2008) menjadi 98.520 orang pelaku seni (2009).
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengunjung museum dari 1.260.150 orang (2008) menjadi 1.976.025 orang (2009)

- c. Meningkatnya kualitas pelayanan dan penonton dari 1.375.500 orang pada tahun 2008 menjadi 2.259.450 orang pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 64,3%
- d. Meningkatnya pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni budaya dari 80 sanggar (2008) menjadi 120 sanggar (2009).
- e. Meningkatnya standar kompetensi para pelaku seni budaya tingkat dasar dan madya dari 1.140 (2008) menjadi 1.800 orang (2009).

18. Urusan Olahraga dan Pemuda

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan olah raga dan pemuda antara lain:

a. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,

- Terselenggaranya pembinaan prestasi 43 cabang olahraga.
- Terselenggaranya pemassalan 14 cabang olahraga.
- Terselenggaranya pengiriman atlet pada 10 event olahraga tingkat Internasional dan 12 event olahraga tingkat nasional.
- Terselenggaranya pelaksanaan 4 event olahraga tingkat Internasional di Jakarta.
- Terlaksananya layanan fasilitas lepas olahraga dengan kunjungan sebanyak 321.096 orang pada tahun 2009.
- Terlaksananya layanan 5 gelanggang olahraga untuk 1.173.918 orang.
- Terlaksananya layanan 5 gelanggang remaja kota administrasi dan 35 gelanggang remaja kecamatan di

Provinsi DKI Jakarta dengan kunjungan sebanyak 2.079.567 orang.

b. Program pembinaan kepemudaan,

- Terbinanya 30 organisasi kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta.
- Terpilihnya 2 orang putra putri utusan DKI Jakarta sebagai paskibraka tingkat nasional.

c. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga,

- Terselenggaranya rehabilitasi 7 prasarana olahraga dan pemuda milik Pemda DKI.
- terselesaikannya pembangunan/rehabilitasi total 4 prasarana olahraga dan pemuda milik Pemda DKI.
- Terehabilitasinya 8 lapangan olahraga milik masyarakat.
- Terselesaikannya sayembara Master Plan dan AMDAL Stadion Taman BMW Jakarta Utara.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan olah raga dan pemuda antara lain:

- a. Meningkatnya jumlah pengguna layanan gelanggang olahraga dari 923.000 orang (2008) menjadi 1.173.918 (2009), layanan gelanggang remaja kota administrasi & kecamatan dari 1.863.300 orang (2008) menjadi 2.079.567 (2009).
- b. Tercapainya prestasi pada event olahraga dan pemuda:
 - Peringkat pertama pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XI/2009 di Palembang.
 - Peringkat kedua pada Pekan Olahraga Pelajar (POPNAS) X/2009 di Jogjakarta.
 - Peringkat kedua pada Kejuaraan Internasional Polo Air Betawi Cup.

- Peringkat ketiga Lomba Seni dan Budaya Pemuda Pelopor Tingkat Nasional.
- Sepuluh besar Lomba Sarjana Pemuda Penggerak Pedesaan (SP3) Tingkat Nasional.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain:

a. Program Peningkatan Peran Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama

- Terlaksananya forum silaturahmi antara ormas, LSM dan partai politik di Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 700 orang.
- Terlaksananya sosialisasi implementasi PBM dan Pergub tentang FKUB Provinsi DKI Jakarta bagi 180 orang.
- Berfungsinya FKUB Provinsi DKI Jakarta.
- Terlaksananya sarasehan peningkatan peran tokoh agama dalam rangka memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama bagi 210 orang.
- Terlaksananya peningkatan peran pembauran bagi lembaga sosial kemasyarakatan bagi 210 orang.
- Berfungsinya FKUB Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

b. Program pengembangan wawasan kebangsaan,

- Terlaksananya pelatihan kader muda Jakarta bagi 100 orang.
- Terlaksananya sosialisasi etika pelayanan berwawasan kebangsaan terhadap warga asing bagi aparat kecamatan dan wilayah bagi 150 orang.
- Terlaksananya peningkatan peran tokoh suku/etnis dalam rangka memperkuat kerukunan antar suku/etnis bagi 210 orang.
- Terlaksananya aktualisasi ketahanan nasional dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap nilai wawasan kebangsaan bagi 280 orang.
- Terlaksananya aktualisasi kewaspadaan nasional dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap nilai bela negara bagi 600 orang.
- Terlaksananya sarasehan pemahaman integrasi bangsa bagi warga komunitas bagi 210 orang.
- terlaksananya sarasehan kerawanan ideologi berdampak terhadap stabilitas politik DKI Jakarta bagi 80 orang.

c. Program pencegahan dan penanggulangan konflik,

- Terlaksananya pemantauan Ipoleksosbud.
- Terlaksananya sarasehan manajemen konflik dalam rangka menangani penyelesaian perselisihan bagi 130 orang.
- Terlaksananya sarasehan dalam rangka penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat bagi 130 orang.
- Terlaksananya pemantapan operasional deteksi dini bagi masyarakat sebanyak 375 orang,
- Terlaksananya sarasehan tentang pencegahan konflik sosial, SARA dan tawuran massa bagi 200 orang,
- Berfungsinya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat,

- Terlaksananya sarasehan potensi kerawanan sosial pasca pelaksanaan Pemilu 2009, bagi 200 orang.

d. Program pendidikan politik masyarakat,

- Terlaksananya Sarasehan membangun etika politik bagi pengurus parpol bagi 130 orang.
- Pelaksanaan forum dialogis kemitraan pimpinan Orkemas Pemuda (OKP) dan LSM bagi 195 orang.
- Terlaksananya peningkatan partisipasi politik perempuan bagi 195 orang.
- Terlaksananya dialog Interaktif antara pemerintah dan DPRD dengan Anggota Dewan Kota dan Dewan Kelurahan/LMK bagi 210 orang.
- Terlaksananya sosialisasi dan implementasi kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat bagi 750 orang.
- Terlaksananya forum dialogis penyampaian aspirasi masyarakat bagi 400 orang.
- Terlaksananya sosialisasi HAM bagi aparat dan masyarakat bagi 425 orang.
- Berfungsinya posko pemilu Provinsi DKI Jakarta.
- Berfungsinya sekretariat panpel Ranham Provinsi DKI Jakarta.
- Terlaksananya pelatihan manajemen bagi pengurus parpol bagi 195 orang

e. Program pengkajian strategik di bidang politik dan keamanan,

- Berfungsinya Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA).
- Terlaksananya koordinasi pemberian izin rekomendasi dan pengawasan lapangan terhadap artis asing.

- Terlaksananya sarasehan peran generasi muda dalam menciptakan situasi DKI Jakarta yang kondusif bagi 375 orang.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain:

- a. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, 60 % sesuai dengan data Pemilu 2009 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- b. Menurunnya jumlah pelanggaran HAM 20% dari tahun 2008.
- c. Semakin mandirinya ormas/LSM menjadi 90% dari jumlah ormas dan LSM yang terdaftar (400 lembaga).

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian antara lain:

- a. **Program peningkatan kinerja pemerintahan kota/kabupaten administrasi,**
 - Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SIPTSP) Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - Penataan ruang pelayanan terpadu Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - Pekan panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Pelayanan penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di wilayah Jakarta Pusat.
- Pelaksanaan pelayanan satu atap/terpadu (Pelayanan Prima) tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Koordinasi, monitoring dan evaluasi program bangun praja.

b. Program peningkatan koordinasi pemerintahan kota/kabupaten administrasi,

- Koordinasi penataan kawasan wisata jajan malam dan kuliner Kecamatan Gambir dan Sawah Besar.
- Koordinasi penataan kawasan industri percetakan wilayah Kelurahan Bungur.
- Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Koordinasi penataan, penetapan dan pengawasan lokasi sementara usaha PKL resmi (JP).
- Koordinasi monitoring dan evaluasi program bangun praja.
- Koordinasi monitoring dan evaluasi fasos fasum pemilik SIPPT di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Pengkoordinasian dan pemantauan perusahaan PMA/PMDN dan pembinaan produk unggulan daerah.
- Koordinasi pengendalian tata ruang dan pengembangan kota.
- Koordinasi monitoring program lingkungan hidup.
- Koordinasi pelayanan IUJK.
- Koordinasi pelaksanaan operasi yustisi.

c. Program peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan,

- Terselenggaranya 13 (tigabelas) kewenangan camat yaitu bidang ketentraman dan ketertiban, pekerjaan umum air,

pekerjaan umum jalan, pertamanan, kebersihan, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pembinaan mental dan kesejahteraan sosial, olah raga dan pemuda.

d. Program peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan,

- Terselenggaranya 3 (tiga) kewenangan lurah yaitu kebersihan, kesehatan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum.

e. Program pembinaan dan pengembangan aparatur,

- terselesaikannya 85 kasus-kasus hukuman disiplin.
- Tersusunnya 10.413 SK kenaikan pangkat pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui proses kenaikan pangkat satu atap.
- Terseleksinya pelamar CPNS (dari umum) sebanyak 18.329 orang.

f. Program peningkatan dan kesejahteraan pegawai,

- Terselesaikannya 1 (satu) konsep rancang bangun Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dalam bentuk Pergub dan Juklak.

g. Program pendidikan dan pelatihan,

- Terseleksinya 839 orang CPNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dari 240 orang CPNS yang ditargetkan sebelumnya.
- Terdidiknya 114 orang pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural.
- Bertambahnya Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelesaikan program tugas belajar pada

jenjang pendidikan D3, S1 dan S2 (dalam dan luar negeri) sebanyak 25 orang.

- Terdidiknya pegawai Pemerintah Provinsi DKI yang sedang mengikuti program tugas belajar pada jenjang pendidikan D3, S1 dan S2 (dalam dan luar negeri) sebanyak 63 orang.
- Tersedianya aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah mengikuti diklat bendaharawan sebanyak 50 orang.
- Tersedianya aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah mengikuti Diklat Akuntansi dan Aset Pemda sebanyak 200 orang.
- Tersusunnya 6 bahan pembelajaran (modul) diklat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

h. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan,

- Terselesaikannya 46 Rapergub OTK perangkat daerah sesuai dengan Perda No. 10/2008.
- Terselesaikannya 39 Rapergub formasi jabatan pada SKPD/UKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Terselesaikannya 2 Rapergub pola koordinasi sekda dan walikota administrasi/kabupaten administrasi.
- Terselesaikannya penataan ruangan kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 3 lokasi (gedung kantor Blok G, Jatibaru dan kantor pelayanan terpadu).

i. Program peningkatan kesadaran hukum dan HAM,

- Terlaksananya temu wicara peningkatan kesadaran hukum bagi warga komunitas.
- Terlaksananya Forum Konsultasi Publik (FKP).
- Terlaksananya pembinaan keluarga sadar hukum (KADARKUM) bagi 250 orang.

- Terlaksananya penyuluhan hukum terpadu (POSKUMDU) bagi 500 orang.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum.

j. Program pelayanan dan bantuan hukum,

- Terlaksananya pengurusan perkara perdata dan TUN, sebanyak 250 perkara.
- terselesaikannya masalah sengketa pertanahan dan aset pemda di DKI Jakarta, sebanyak 186 perkara.

k. Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

- Tersusunnya laporan periodik sebagai hasil monitoring dan status penyelesaian TLHP APIP atas pemeriksaan/penanganan kasus pengaduan masyarakat sebanyak 4 laporan.
- Tersusunnya laporan periodik sebagai hasil monitoring dan status penyelesaian TLHP BPK-RI sebanyak 6 laporan.
- Tersusunnya laporan periodik hasil monitoring dan status penyelesaian TLHP APIP sebanyak 4 laporan.
- Meningkatnya jumlah penyelesaian penanganan kasus dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- Tersusunnya laporan monitoring anev dan buril sebanyak 4 laporan.
- Tersusunnya laporan hasil review keuangan pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 sebanyak 1 laporan.

I. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah,

- Terlaksananya kegiatan reses dan tersusunnya laporan reses sebanyak 3 laporan.
- Terlaksananya pembentukan 8 alat kelengkapan dewan.
- Terlaksananya dialog interaktif anggota DPRD dengan warga DKI Jakarta di media elektronik pada 4 media.
- Terlaksananya penerimaan delegasi masyarakat 36 kali.
- Terlaksananya pembahasan Raperda lainnya sebanyak 7 raperda.
- Terlaksananya pengesahan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta hasil pemilu tahun 2009 sebanyak 94 orang.
- Tersusunnya draft tata tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2009 – 2014.

m. Program keprotokolan daerah,

- Terselenggaranya penerimaan/pelayanan tamu pimpinan dalam dan luar negeri sebanyak 144 kali.
- Terselenggaranya pencahangan apel dan malam resepsi HUT Kota Jakarta sebanyak 3 kegiatan.
- Tersedianya bahan acara gubernur/rapat pimpinan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 108 kali.
- Terlaksananya kegiatan acara keprotokolan pimpinan daerah sebanyak 2.510 kali.
- Terlaksananya jamuan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 109 kali.

n. Program peningkatan kerjasama antar daerah

- Keikutsertaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada forum organisasi internasional, UCLG ASPAC dan UCLG World, serta ANMC21.
- Keikutsertaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 11 program joint project ANMC21.
- Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan keolahragaan dan seni budaya dengan kota-kota sister cities dengan 3 kota.
- Terlaksananya penerimaan kunjungan 11 delegasi kota-kota sister cities Jakarta dan calon sister cities, serta kunjungan ke 10 kota-kota sister cities Jakarta.
- Terlaksananya kerjasama teknik 10 program pelatihan.
- Terlaksananya fasilitasi kerjasama pengiriman 75 kk transmigran ke daerah tujuan serta tersusunnya 12 MoU kerjasama.
- Ditandatanganinya 3 keputusan bersama kerjasama provinsi dan FKD-MPU dengan 10 Provinsi.
- Terlaksananya kerjasama perkotaan berbatasan/ Jabodetabekjur.
- Terlaksananya evaluasi Forum Kerjasama Daerah MPU (FKD-MPU).

o. Program pelayanan kerumahtanggaan dan persandian,

- Tersusunnya notulasi dan monitoring tindak lanjut rapat pimpinan sebanyak 108 dokumen.
- Terlaksananya pengendalian surat/perbal pada TU gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah dan para asisten.
- Terlaksananya penataan dan perawatan naskah dinas pimpinan daerah sebanyak 72 naskah dinas.

- Terlaksananya updating program-program data base pimpinan pemerintah daerah sebanyak 2 program.
- Tersusunnya naskah sambutan gubernur / wakil gubernur sebanyak 1.740 naskah.
- Terlaksananya pelayanan administrasi 4 deputi gubernur.
- Terlaksananya pengelolaan kerumahtanggaan gubernur dan wakil gubernur.

p. Program peningkatan kinerja ketentraman dan ketertiban umum,

- Terlaksananya wastib PMKS, PSK, PK-5 dan sejenisnya.
- Terlaksananya pelatihan PAM Pemilu 2009.
- Terlaksananya diklat Polisi Pamong Praja tingkat dasar bagi 225 orang,.
- Terlaksananya penanggulangan gejolak massa.
- Terlaksananya praja wibawa.
- Terlaksananya pemantauan dan antisipasi titik operasi pengamanan dan penertiban.
- Terlaksananya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di tingkat provinsi dan 6 kota/kabupaten.
- Terlaksananya koordinasi Muspida (Polda, Kodam, Armabar, TNI-AU, Pengadilan Tinggi DKI, Kejati DKI, dan PTUN DKI Jakarta).
- Terlaksananya wasriktib Perda 10 tahun 2004 dan HO STBLD No. 26 tahun 1926.
- Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat dan pemberitaan mass media mengenai gangguan tempat usaha.

- Terlaksananya fasilitasi pendidikan politik terhadap 3.500 orang.
- Terlaksananya Pemilu yang tertib dan lancar di 267 kelurahan.
- Terlaksananya pelayanan ketertiban yang cepat dan manusiawi terhadap potensi gangguan tramtibmas di 5 kota administrasi.
- Terlaksananya 1 paket fasilitas Posko Pemilu untuk pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres.

q. Program peningkatan pengelolaan bahaya kebakaran,

- Pilot project pembangunan Sistem Ketahanan Lingkungan terhadap Kebakaran (SKLK) Terpadu 5 Lokasi,
- Terlaksananya sosialisasi Perda pengganti Perda 3/92 bagi 200 orang.
- Terlaksananya pemeriksaan berkala dan sewaktu-waktu sistem proteksi & keselamatan kebakaran terhadap 255 lokasi/gedung/ bangunan.
- Terlaksananya pemeriksaan gedung asset Pemda (sekolah, panti asuhan/sosial, perpasaran) sebanyak 20 gedung.
- Terlaksananya pemeriksaan berkala bangunan menengah dan rendah sebanyak 1.902 bangunan.
- Pembinaan dan pelatihan BALAKAR untuk masyarakat bagi 200 orang.
- Terlaksananya pembentukan dan latihan SKKL sebanyak 44 SKKL.
- Terlaksananya gladi operasi sentra ekonomi pada 7 lokasi.
- Terlaksananya gladi operasi PD Pasar Jaya/Tradisional/UKM pada 5 lokasi.

- Terlaksananya gladi operasi bangunan menengah pada 10 bangunan.
- Terlaksananya gladi operasi lingkungan padat hunian pada 20 kawasan.
- Terlaksananya pemeriksaan berkala bangunan gedung.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian antara lain:

- a. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan umum dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi dan provinsi
- b. Terlaksananya administrasi keuangan daerah, sehingga mendapatkan peringkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
- c. Terlaksananya pembentukan organisasi perangkat daerah, sesuai dengan amanat perundang-undangan.
- d. Terlaksananya pelayanan terpadu satu atap di 5 wilayah kota
- e. Respon time pemadam kebakaran 15 menit.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ketahanan pangan antara lain:

a. Program pengamanan distribusi daging,

- Terlaksananya fasilitasi pasar murah produk peternakan menjelang hari raya Idul Fitri sebanyak 38.5 ton daging di lima wilayah kota administrasi.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan

- Terlaksananya pembangunan gedung *workshop/prospecting unit* pasca panen seluas 804 m².
- Terlaksananya pemberdayaan usaha KK rawan pangan/KK miskin dan gizi buruk.
- Terlaksananya pengadaan sarana prasarana *workshop/prospecting unit* untuk 1 gedung.
- Terlaksananya rehab Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari.

c. Program pelaksanaan SPM lain urusan Ketahanan Pangan,

- Terlaksananya pengembangan sarana teknologi hidroponik berupa pekerjaan lanjutan pemagaran site kebun sepanjang 1.400 m dan penambahan sistem penyiraman (NFT) serta sistem pengkondisian udara seluas 1.250 m².
- Terlaksananya pengembangan sayuran ramah lingkungan (organik) seluas 9 ha, dengan rincian berupa pemberian bantuan pupuk kandang 20.000 kg dan bibit sayuran untuk 3 kelompok tani.
- Terlaksananya peningkatan fasilitas kebon bibit Cilangkap dengan bertambahnya kapasitas penampungan tanaman budidaya sebanyak 24.000 pot dan pembuatan gudang pusat informasi, sere tanaman hias dan sarana pendukung seluas 5.000 m².
- Terlaksananya peningkatan teknologi pengolahan pangan kepada 10 kelompok.
- Terlaksananya penerapan intensifikasi sawah seluas 50 ha, dengan rincian Jakarta Utara seluas 30 Ha dan Jakarta Barat 20 Ha.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian antara lain:

- a. Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat
- b. Tersedianya kebutuhan pokok masyarakat berupa:
 - Pasokan beras 1.104.922 ton
 - Sayur-mayur 470/520 ton
 - Buah-buahan 320.300 ton
 - Pasokan daging sapi 41.425 ton
 - Pasokan daging ayam 146.615 ton
 - Pasokan telur 172.410 ton
 - Pasokan ikan 238.250 ton

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain:

a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan,

- Terlaksananya peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan limbah rumah tangga pada 12 kelurahan dengan menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Terlatihnya 95 PKB dan 83 kader pemberdayaan masyarakat.
- Terlaksananya pengembangan jati diri remaja di kawasan pemberdayaan masyarakat sebanyak 50 remaja.
- Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat di 267 kelurahan.

- Terpilihnya 6 kelurahan terbaik, dan juara I (satu) Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang kemudian mendapatkan penghargaan sebagai juara III (tiga) Tingkat Nasional.
- Terfasilitasinya 267 kelurahan yang mendapatkan bantuan pemberdayaan masyarakat.
- Terlaksananya monitoring dan supervisi lumbung pangan kelurahan pada 267 kelurahan.
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan PPMK kepada 267 kelurahan.
- Terlaksananya bimbingan teknis profil kelurahan, pendataan dan evaluasi swadaya masyarakat kepada 61 kelurahan.

b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan,

- Terlaksananya Rakor Penanggulangan Kemiskinan.
- Tersedianya data dasar TTG untuk 267 kelurahan.
- Terlatihnya fasilitator program kemandirian masyarakat perkotaan di 5 wilayah kota sebanyak 1.236 orang.
- Terlaksananya participatory basic training community development bagi 224 petugas.
- Terbentuknya Posyantek percontohan di 5 kecamatan (Kec. Cempaka Putih, Kec. Pademangan, Kec. Kebon Jeruk, Kec. Pancoran dan Kec. Kramat Jati).

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain:

- a. Juara Harapan I Kelurahan terbaik Tingkat Nasional (Kelurahan Ulujami)
- b. Juara III Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat (TTG) Nasional
- c. Kelurahan Percontohan yang menggunakan dan memanfaatkan TTG sebanyak 12 Kelurahan.

23. Urusan Statistik

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan statistik antara lain:

a. Program pengembangan statistik daerah

- Tersusunnya Jakarta/wilayah Dalam Angka
- Tersusunnya PDRB Hijau
- Tersusunnya up dating Rumah Tangga Sasaran
- Tersusunnya perkembangan tingkat konsumen
- Tersusunnya indikator kesejahteraan rakyat Kep. Seribu
- Tersusunnya potensi manufaktur

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan statistik antara lain:

- a. Tersediannya data statistik yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan program pembangunan.
- b. Tersusunnya indikator asumsi makro dalam rangka penyusunan APBD maupun APBDP.
- c. Tersediannya data rumah tangga sasaran yang digunakan untuk pelayanan JPK Gakin.

24. Urusan Kearsipan

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan kearsipan antara lain:

a. Program pengembangan kapasitas penyimpanan arsip daerah

- Terlaksananya penyusutan arsip sebanyak 5 (lima) SKPD yang terdiri dari 9.807 berkas/dokumen dan 202 boks.
- Tercapainya penyelamatan dan penggunaan arsip/dokumen yang bernilai guna.
- Terlaksananya pendataan arsip sebanyak 3.957 boks.
- Terdatanya arsip/dokumen yang bernilai guna di 5 (lima) wilayah kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Terakuisisinya arsip dan dokumen yang bernilai guna untuk 5 wilayah kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 203 boks.

b. Program peningkatan pelayanan arsip daerah,

- Terlaksananya penggalan arsip/dokumen Gubernur

c. Program penyelamatan arsip daerah,

- Terlaksananya liputan peristiwa daerah yang penting/fenomenal sebanyak 180 liputan/rekaman.
- Terekamnya informasi peristiwa daerah yang penting/fenomenal yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

d. Program peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan,

- Tersedianya 15 unit komputer dan 27 unit printer.
- Tersedianya mesin absensi handkey.

e. Program pelaksanaan SPM lain urusan Kearsipan,

- Tersedianya boks arsip sebanyak 72.525 buah.
- Tersedianya boks arsip untuk SKPD – SKPD.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kearsipan antara lain:

- a. Dokumen/arsip daerah yang didokumentasikan melalui media sebanyak 107.500 lembar tahun 2008, bertambah: 70.000 halaman; 3.000 lembar foto dan mikrofilm: 2.250 halaman pada tahun 2009.
- b. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika antara lain:

a. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

- Terlaksananya 12.000 entry data dan Informasi yang aktual melalui sarana Teknologi Informasi .
- Disusunnya 9.125 berita dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

b. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- Terbangunnya 2 aplikasi Sistem Informasi dalam rangka e-Procurement
- Terbangunnya 8 aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
- Beroperasinya help desk IT e-procurement
- Tersedianya Mobil Operasional Spesifik Khusus untuk Pemantauan, Pendataan Pengawasan dan Pengendalian Jasa Bidang Postel

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan komunikasi dan informatika antara lain:

- a. Meningkatnya jumlah Kegiatan Pemantauan, Pendataan Pengawasan dan Pengendalian Jasa Bidang Postel dari 8 kali menjadi 12 kali per bulan.
- b. Meningkatnya pemanfaatan Data dan Informasi sebesar 30%.

- c. Jumlah Pengunjung dan yang memanfaatkan sebagai sumber informasi sebanyak 2.500.000 orang.
- d. Meningkatnya jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi e-Procurement dari 42 SKPD/UKPD (2008) menjadi 200 SKPD/UKPD (2009).
- e. 52 SKPD/UKPD Entitas Akutansi yang terintegrasi dengan Pengelola Keuangan Daerah

26. Urusan Perpustakaan

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan perpustakaan antara lain:

a. Program pengembangan perpustakaan Jakarta,

- Terbangunnya satu buah Gedung Perpustakaan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Tersedianya layanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Utara.

b. Program pemberdayaan komunitas perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan,

- Bertambahnya bahan perpustakaan sebanyak 1.461 judul, 6.921 eksemplar.
- Terlaksananya kegiatan bedah buku, talk show, dan layanan bercerita sebanyak 8 (delapan) kali.
- Terlaksananya pameran sebanyak 26 (dua puluh enam) kali.
- Meningkatnya minat baca masyarakat.
- Perpustakaan semakin dikenal masyarakat.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan,

- Terbentuknya sebuah perpustakaan umum kabupaten administrasi.
- Terhimpunnya 3.789 judul koleksi bahan perpustakaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam.
- Bertambahnya koleksi bahan perpustakaan karya cetak dan karya rekam menjadi 8.315 judul, 9.377 eksemplar.
- Terlaksananya pengembangan jaringan dan otomasi perpustakaan.
- Bertambahnya jumlah pemustaka yang terlayani.

d. Program pelaksanaan SPM lain urusan perpustakaan,

- Terlaksananya layanan perpustakaan kepada masyarakat selama 7 Hari dalam seminggu selama 52 minggu (1 Tahun).

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perpustakaan antara lain:

- a. Bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 572.877 orang tahun 2008, menjadi 602.521 orang tahun 2009.
- b. Bertambahnya jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dari 130 buah tahun 2008 menjadi 136 buah tahun 2009.
- c. Jumlah perpustakaan keliling tahun 2008 berjumlah 21 mobil menjadi 23 mobil tahun 2009.
- d. Meningkatnya kompetensi pengelola taman bacaan dari 120 orang tahun 2008 menjadi 126 orang tahun 2009.

C. Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan pariwisata antara lain:

a. Program pengembangan destinasi pariwisata,

- Terselenggaranya pemilihan Abang dan Nene Jakarta Tahun 2009,
- Terselenggaranya Jakarta Fashion Week. penyelenggaraan Enjoy Musik Festival, penyelenggaraan Enjoy Food Festival,
- Terselenggaranya Enjoy Jakarta Marine Festival,
- Terselenggaranya Enjoy Jakarta Greet Sale, Meeting Service, atraksi Kotatua dan Jakarta Internasional Filateli Expo.

b. Program pengembangan pemasaran pariwisata,

- Terlaksananya promosi pariwisata luar negeri sebanyak 7 event/14 negara (ATM Dubai, ITB Berlin dan Tongtong Den Haag-Belanda, KOTFA Korea, ITE Hongkong, MATTA Fair II Malaysia, CITM Cuning-China, IMEX Frankfurt Jerman, JATA Jepang, Roadshow Eropa Inggris dan Rusia, Roadshow Asia China, Malaysia dan Singapura, roadshow kawasan Timur Tengah Istanbul Turkey dan Doha Qatar) dan dalam negeri sebanyak 3 event/12 kota (Jakarta Golf di Jakarta, promosi budaya Bangka Belitung dan Bali, promosi pariwisata di Bandung, Surabaya, Jogjakarta, Lampung, Jakarta Tourism Expo (JTE), Manado, Palembang, Medan, Semarang, Balikpapan dan Makassar).
- Terlaksananya pemasangan iklan di media elektronik dalam negeri sebanyak 19 stasiun dan luar negeri sebanyak 4 stasiun.
- Pemasangan iklan di media cetak dalam negeri sebanyak 9 media cetak dan luar negeri sebanyak 6 media cetak.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pariwisata antara lain:

- a. Jumlah kunjungan wisman dari 1.534.432 orang (2008) menjadi 1.451.914 orang (2009), kunjungan wisnus dari 15.741.967 orang (2008) menjadi 16.708.834 orang (2009)

- b. Meningkatnya lama tinggal wisman 3,08 hari (2008) menjadi 3,48 hari (2009)
- c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, pada tahun 2009 mencapai Rp. 1.637.257.123.724,- atau mengalami kenaikan 7,37 % dibanding 2008.
- d. Penerimaan devisa wisman US\$ 736,70 juta.
- e. Penerimaan devisa wisnus Rp. 14,17 triliun.

2. Urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan perikanan, kelautan, dan peternakan antara lain:

a. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi perikanan, kelautan, dan peternakan,

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perikanan tangkap.
- Terlaksananya pembinaan kesehatan dan mutu pakan ikan.
- Terlaksananya supervisi bantuan usaha peternakan dan perikanan.
- Terlaksananya monitoring dpl, fish shelter dan transplantasi karang di 3 lokasi (P. Kelapa, P. Kaliage, Karang Waroh, P. Pramuka Gosong Pramuka dan P. Pari).

b. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan,

- Terlaksananya perencanaan teknis relokasi pusat jajan serba ikan.
- Terlaksananya pengendalian mutu ikan di pasar swalayan dan sentra hasil perikanan.
- Terlaksananya supervisi ketersediaan dan harga produk perikanan.

- Terlaksananya pengawasan mutu hasil perikanan tangkap dan budidaya di 5 wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
- Terlaksananya promosi agribisnis perikanan budidaya.

c. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan,

- Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Terlaksananya pembinaan nelayan provinsi DKI Jakarta tentang peraturan kelautan kepada 50 orang.

d. Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan, kelautan, dan peternakan,

- Terlaksananya pembangunan tanggul rob (Muara Angke) sepanjang 802 m.
- Terlaksananya pembuatan DED pengembangan pelabuhan perikanan Muara Angke.
- Terlaksananya Pengadaan sarana penunjang informasi budidaya.
- Terlaksananya rehab kandang RPH Kapuk.
- Terlaksananya rehab kantor RPH Cakung.

e. Program pengembangan usaha peternakan, budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap,

- Terlaksananya penyusunan model keramba budidaya bandeng, kerapu dan rumput laut.
- Terlaksananya pengadaan keramba jaring apung.
- Terlaksananya peningkatan usaha budidaya ikan hias.

f. Program pengelolaan sumberdaya peternakan perikanan dan kelautan,

- Terlaksananya peningkatan kegiatan laut bersih dan ekosistem laut.
- Terlaksananya pembangunan fish shelter dan terumbu karang sebanyak 100 unit.

- Terlaksananya pemberdayaan wanita nelayan sebanyak 125 orang, di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

g. Program pemberdayaan komunitas peternakan, perikanan dan kelautan,

- Terlaksananya rembug KTNA Tingkat Provinsi DKI Jakarta, dengan peserta 50 KTNA.

h. Program penerbitan sertifikat mutu ekspor,

- Terlaksananya pemantauan UPI dalam rangka pra verifikasi HACCP dan Pra SKP.

i. Program pemasaran produk perikanan,

- Terlaksananya peningkatan kemampuan nelayan ke BBPPI Semarang kepada 30 nelayan.
- Terlaksananya pengembangan pemasaran hasil perikanan.

j. Program peningkatan produksi hasil peternakan,

- Terlaksananya pengawasan pengendalian peredaran bibit dan pakan ternak serta penyakit reproduksi pada sapi perah dan kambing.
- Terlaksananya pameran dan promosi Jak Aqua Zoo.
- Terlaksananya partisipasi pameran dan promosi luar daerah.

k. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak,

- Terlaksananya pemeriksaan kesehatan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan (Idul Adha, Idul Fitri, Imlek, Natal dan Tahun Baru).
- Terlaksananya sertifikasi dan sosialisasi petugas pemotongan hewan.
- Terlaksananya pemeriksaan dan supervisi aspek sanitasi dan hygiene penanganan pangan asal hewan di perusahaan BAH/HBAH.

- Terlaksananya pembangunan RPH Babi Kapuk.
- Terlaksananya pembangunan krematorium dan rumah genset RPH Kapuk.
- Terlaksananya pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.
- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan hewan.
- Terlaksananya pembangunan lanjutan Tempat Penampungan Ayam (TPnA)/ Tempat Pemotongan Ayam (TPA) Rawa Kepiting.
- Terlaksananya apresiasi verifikasi bebas flu burung pada produk unggas.
- Terlaksananya rehabilitasi pagar kawasan TPnA/TPA Rawa Kepiting.
- Terlaksananya penyuluhan Perda No. 4 Tahun 2007 pengendalian, pemeliharaan dan peredaran unggas.
- Terlaksananya penerapan rantai dingin dalam pemasaran daging ayam.
- Terlaksananya aksi pelaksanaan Perda 4 tahun 2007.
- Terlaksananya supervisi pengawasan dan penertiban TPA dan TPnA dan koordinasi pengawasan dan penertiban Perda 4 Tahun 2007.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perikanan, kelautan, dan peternakan antara lain:

- a. Terpenuhinya pasokan kebutuhan daging murah ke masyarakat pada hari-hari besar keagamaan.
- b. Bertambahnya lahan Balai Benih Ikan (BBI).
- c. Bertambahnya *fishing ground*.
- d. Meningkatnya jaminan keamanan ikan yang dipasarkan di swalayan dan sentra pemasaran.

3. Urusan Perdagangan

Disamping Program penerapan kaidah *good governance* dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan perdagangan antara lain:

- a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,**
 - Terlaksananya monitoring perkembangan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat DKI Jakarta di pasar tradisional.
 - Terlaksananya operasional badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk).
- b. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri,**
 - Terlaksananya pelaksanaan Pasar Lelang di DKI Jakarta.
- c. Program peningkatan promosi dan pengembangan ekspor,**
 - Partisipasi pada forum ANMC 21 di Thailand.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perdagangan antara lain:

- a. Meningkatnya kepastian pemenuhan 15 jenis kebutuhan pokok pada masyarakat.
- b. Meningkatnya intensitas pelaksanaan pasar lelang agro menjadi 173 transaksi senilai nilai Rp 8 miliar lebih dengan jumlah peserta 200 orang.
- c. Dikenalnya produk DKI Jakarta oleh semua Ibukota Negara Asia dan juga dikenal sebagai kota yang memiliki banyak peluang investasi.
- d. Kemudahan mendapatkan informasi tentang pengembangan industri unggulan provinsi, sebesar 25%.
- e. Bertambahnya perusahaan yang berkualitas ekspor, sebanyak 1%.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan terdiri dari Tugas Pembantuan yang Diterima dan Tugas Pembantuan yang Diberikan. Tugas Pembantuan yang Diterima merupakan Tugas Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian, sedangkan Tugas Pembantuan yang Diberikan dimaksudkan Pemerintah Provinsi memberikan Tugas Pemerintahan kepada Pemerintahan Kota/Kabupaten. Karena Provinsi DKI Jakarta merupakan Daerah Otonom yang didalamnya tidak dibagi lagi dalam Kota/Kabupaten Otonom, maka Tugas Pembantuan untuk Provinsi DKI Jakarta hanya terdiri dari Tugas Pembantuan yang Diterima.

Untuk tahun 2009, Provinsi DKI Jakarta menerima Tugas Pembantuan dari 3 Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Sosial dengan nilai keseluruhan yang diterima sebesar Rp.9,36 Milyar dengan realisasi sebesar Rp.6,73 Milyar. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

A. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 menerima Tugas Pembantuan sebesar Rp.6,28 Milyar dengan realisasi sebesar Rp.5,12 Milyar, untuk melaksanakan program antara lain:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya. Realisasinya antara lain: terselenggaranya pengembangan budidaya laut di Kepulauan Seribu, terlaksananya pengadaan budidaya ikan hias, pengadaan pakan ikan, terlaksananya pengadaan benih kerapu, pengadaan pompa air laut dan generator.

2. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan kawasan budidaya air tawar. Realisasinya antara lain: terselenggaranya kawasan budidaya air tawar, terlaksananya pengadaan induk ikan air tawar, terlaksananya pengadaan pakan alami, dan pengadaan obat-obatan, terselenggaranya rehabilitasi kolam dan pengerukan waduk di Kalideres, serta pengerukan waduk di Ujung Menteng.

B. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2009 menerima Tugas Pembantuan sebesar Rp.815 Juta dengan realisasi sebesar Rp.99 Juta, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi pada tahun 2009 menerima Tugas Pembantuan sebesar Rp.830 Juta dengan realisasi sebesar Rp.765 Juta dan Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2009 menerima Tugas Pembantuan sebesar Rp.500 Juta dengan realisasi sebesar Rp.172 Juta, untuk melaksanakan program :

1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- a. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain fasilitas dukungan manajemen ketransmigrasian di wilayah cepat tumbuh. Realisasinya antara lain dukungan manajemen ketransmigrasian guna mendukung pelaksanaan kegiatan pengerahan dan penempatan transmigrasi.
- b. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembinaan promosi, investasi dan kemitraan di wilayah strategis cepat tumbuh. Realisasinya antara lain: promosi, investasi dan kemitraan guna memasyarakatkan kebijakan dan kegiatan P4T (Pembinaan, Penyusunan, Pelaksanaan Persiapan Pemukiman dan Transmigrasi).
- c. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah

strategis dan cepat tumbuh. Realisasinya antara lain perpindahan serta penempatan transmigrasi.

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum serta keselamatan dan kesehatan kerja, pendidikan dan pelatihan masyarakat, penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan, serta pengembangan kelembagaan. Realisasinya adalah peningkatan pengawasan, perlindungan, penegakan hukum serta keselamatan dan kesehatan kerja, bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kepada masyarakat, pemeriksaan kasus kecelakaan kerja, serta pemeriksaan kerja malam perempuan/diskriminasi.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- a. Seksi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu melaksanakan kegiatan peningkatan fungsi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi dan pembinaan teknis administrasi. Realisasinya adalah terselenggaranya kegiatan revitalisasi untuk mendukung BLK menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi serta tersedianya dukungan administrasi kegiatan selama 12 bulan.
- b. Kegiatan yang telah dilaksanakan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, antara lain pembinaan teknis administrasi kegiatan. Realisasinya adalah tersedianya dukungan administrasi kegiatan tugas pembantuan selama 12 bulan.

C. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Kementerian Sosial

Dinas Sosial tahun 2009 menerima Tugas Pembantuan sebesar Rp.942 Juta dengan realisasi sebesar Rp.565 Juta, untuk melaksanakan program:

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberdayaan organisasi sosial, pemberdayaan pekerja sosial masyarakat, pemberdayaan Karang Taruna, dan pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Realisasinya antara lain: pemberdayaan 40 organisasi sosial di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur, terberdayakannya 100 pekerja sosial masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur, terpilihnya 5 Karang Taruna Berprestasi di tingkat provinsi, dan terselenggaranya kegiatan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat di 6 desa/kelurahan.

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberdayaan fakir miskin dan pemberdayaan keluarga miskin. Realisasinya antara lain terlaksananya program pemberdayaan fakir miskin di provinsi, dan meningkatnya jumlah keluarga rentan tertangani.

3. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migran, pendayagunaan sumber dana sosial, dan akses jaminan sosial. Realisasinya antara lain tersalurkannya bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah melalui 4 kegiatan di Provinsi DKI Jakarta, terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial, dan terlindunginya pekerja mandiri di sektor informal sebanyak 1.000 kepala keluarga.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerja Sama Antar Daerah/Kota

1. Kerja sama DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Bodetabekjur)

a. Hibah.

Setiap tahun anggaran dianggarkan hibah kepada Kabupaten/Kota disekitar Jakarta dalam rangka memfasilitasi terbentuknya kerjasama yang lebih menyeluruh. Pada tahun 2009, dianggarkan Hibah sebesar Rp40.000.000.000, untuk Kabupaten/Kota tetangga Provinsi DKI Jakarta. Hibah ini tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan Hibah dianggarkan pada Perubahan APBD yang penetapannya pada 10 September 2009. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten/Kota Bodetabekjur tidak bisa mencatat Hibah tersebut dalam Dokumen APBD masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun yang bersangkutan.

b. BKSP

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain penyusunan *road map* peningkatan kapasitas aparatur BKSP Jabodetabekjur dan kajian akademis mengenai revitalisasi kelembagaan kerja sama antar daerah Jabodetabekjur.

Realisasi bantuan keuangan untuk operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur sebagaimana dalam Tabel 6.1.

**Tabel 6.1. Bantuan Keuangan kepada Sekretariat BKSP
Jabodetabekjur Tahun 2003-2009**

No	Tahun	DKI	Jawa Barat
1	2003	3.605.865.000	
2	2004	2.650.000.000	
3	2005	1.500.000.000	
4	2006	2.000.000.000	
5	2007	3.000.000.000	
6	2008	2.200.000.000	
7	2009	1.500.000.000	

Sumber : Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, Tahun 2009.

2. Kerja sama Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi se Jawa-Bali

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional se Jawa-Bali di Jakarta, yang menghasilkan deklarasi kesepakatan kerja sama regional se Jawa-Bali dan advokasi ke Pemerintah Pusat meliputi:

- 1) Optimalisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang terpadu melalui *“one gate policy and programming”*;
- 2) Pembahasan sinkronisasi dan pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menangani kemiskinan dan pengangguran, dan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada tingkat provinsi. Selama ini, alokasi DAK tidak dikonsultasikan dengan Provinsi, dan dananya dialokasikan ke Kabupaten/Kota.
- 3) Penyempurnaan Permendagri 13 Tahun 2006, khususnya memperjelas mekanisme pembahasan RAPBD oleh legislatif, berkaitan dengan fungsi *budget* RAPBD, dalam hubungannya dengan efektivitas perencanaan pembangunan.

3. Kerja Sama Luar Negeri

a. Program *Sister City*

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) *Sister City* dengan 21 kota di seluruh dunia. Beberapa kota yang aktif dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 6.2.
Program Sister City DKI Jakarta dengan Kota Lain

NO	KOTA	NASKAH YANG DITANDATANGANI	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN
1.	Seoul, Korea Selatan	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tanggal 25 Juli 1984.	1) Sistem Adm. Umum dan Kependudukan. 2) Manajemen dan Perencanaan Kota. 3) Penataan lalu lintas dan transportasi. 4) Pengawasan dan penataan lingkungan. 5) Pembangunan masyarakat. 6) Program kesenian dan kebudayaan. 7) Peningkatan program ketenagakerjaan.
2.	Rotterdam, Belanda	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tanggal 1 Agustus 1986	1) Sistem Informasi Manajemen 2) Teknologi Penanganan Sampah padat dan pemusnahan 3) Sampah 4) <i>City Cargo Terminal</i> 5) Bidang-bidang yang disetujui oleh kedua kota.
3.	Tokyo, Jepang	Pernyataan Bersama tanggal 23 Oktober 1989.	1) Manajemen perkotaan 2) kebudayaan. 3) Kesenian. 4) Olahraga dan bidang-bidang lain yang disepakati kedua Pemerintah Kota.
4.	Beijing, RRC	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tanggal 4 Agustus 1992	1) Administrasi Perkotaan. 2) Kesehatan Masyarakat. 3) Pembangunan Perkotaan. 4) Manajemen Pariwisata. 5) Industri Kecil dan Kerajinan.
5.	Berlin, Jerman	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tanggal 13 April 1994	1) Perencanaan Kota. 2) Angkutan Umum Kota. 3) Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah. 4) Perencanaan Pembangunan Perumahan. 5) Ekonomi. 6) Kebudayaan.
6.	Bangkok, Thailand	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tanggal 21 Januari 2002	1) Perdagangan dan investasi 2) Promosi pariwisata dan manajemen 3) <i>Traffic control</i> 4) Perencanaan perkotaan 5) Sumber daya manusia 6) Administrasi pemerintahan daerah
7.	Moskow, Rusia	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> Tanggal 22 Juni 2007	1) Arsitektur dan Taman Kota 2) Pertamanan dan Monumen Kota 3) Olah Raga, Kebudayaan dan Seni Pertunjukkan 4) Pengelolaan Transportasi Kota 5) Pengelolaan Pariwisata 6) Perdagangan dan Investasi

NO	KOTA	NASKAH YANG DITANDATANGANI	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN
			7) Fasilitasi Program Pertukaran Lembaga Legislatif

Sumber : Biro KDH dan KLN Provinsi DKI Jakarta tahun 2009

b. Keanggotaan dan partisipasi pada organisasi dan event internasional

Selain melaksanakan kerjasama dengan berbagai kota luar negeri *sister city*, Pemprov DKI Jakarta juga menjadi anggota aktif pada 4 organisasi internasional, yaitu:

- 1) *United Cities and Local Government* (UCLG)
- 2) *Asian Network of Major Cities* (ANMC) 21
- 3) Metropolis
- 4) Citynet

4. Kerjasama teknik dan jasa ekonomi luar negeri

a. Kerjasama Teknik Luar Negeri

Program kerjasama teknik luar negeri yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta pada dasarnya adalah dalam rangka implementasi program bantuan luar negeri dalam bentuk hibah (*grant*) yang diberikan oleh negara-negara maju dan lembaga donor kepada pemerintah Republik Indonesia (cq. Setneg).

Program kerjasama teknik luar negeri meliputi:

- 1) Bantuan proyek
- 2) Beasiswa/pelatihan
- 3) Tenaga ahli
- 4) Peralatan
- 5) Bantuan program kemanusiaan

Realisasi program kerjasama teknik luar negeri tahun 2009, antara lain:

- 1) Hibah seperangkat kapal keruk dari Pemerintah Kerajaan Belanda
- 2) Kerjasama penanggulangan HIV AIDS dengan Ausaid
- 3) Kerjasama antisipasi perubahan iklim dengan KEMCO
- 4) Program pelatihan "*Use of IT in Public Administration*" di Singapura

- 5) Program pelatihan "*Eco-friendly Urban Transportation Management*" di Seoul
- 6) Program pelatihan "*Sustainable Environment Management*" di Seoul
- 7) Program pelatihan "*Chinesse Language Teaching*" di Beijing
- 8) Program bantuan peralatan dan tenaga ahli bidang kesehatan dari lembaga internasional *Mercy Cops*.
- 9) Program bantuan tenaga ahli bidang kerjasama internasional dari lembaga GTZ Jerman

b. Jasa Ekonomi Luar Negeri

Kerjasama jasa ekonomi luar negeri yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta pada dasarnya bertujuan selain untuk meningkatkan citra positif kota Jakarta di dunia internasional, juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kota Jakarta melalui berbagai kegiatan pameran/promosi dalam bidang pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta investasi.

Realisasi kegiatan tahun 2009, antara lain:

- 1) *International Turismus Borse* di Berlin
- 2) *Arabian Travel Market* di Dubai
- 3) *International Meeting Exhibition (IMEX)* di Frankfurt
- 4) *Korea Travel Fair (KOFTA)* di Seoul
- 5) *International Travel Expo (MICE)* di Hongkong
- 6) *Japan Association of Travel Agents World* di Tokyo
- 7) *Jakarta Bussiness Forum* di Seoul, Taipei, Brisbane, Budapest, Frankfurt, dan Abu Dhabi
- 8) Promosi investasi di Dubai

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Tahun 2009

1. Kerjasama di Bidang Keindahan Kota

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Honda Respect Motor, berupa kerjasama penghijauan 64 pohon Flamboyan, 12 pohon Kamboja Rantai, 52 rumpun bambu Cina dan 12.000 pot tanaman hias di lokasi tepian air kali Banjir Kanal Barat Jakarta Selatan. Sumber dana dari pihak ketiga senilai 280.000.000.

2. Kerjasama Pemanfaatan Asset

Kerjasama Pemanfaatan Asset dilakukan dengan metode sewa asset daerah dan kerjasama asset daerah. Sewa asset daerah yang direncanakan Pemprov memperoleh pendapatan Rp.525.000.000,00 hanya terealisasi Rp.108.083.334,00 atau 20,59%. Sedangkan kerjasama asset daerah terealisasi sebesar Rp.550.698.317,00 atau 31,63% dari rencana semula sebesar Rp.1.740.925.000,00. Dengan demikian, kerjasama pemanfaatan asset secara keseluruhan hanya terealisasi sebesar Rp.658.781.651,00 atau 29,07% dari rencana sebesar Rp.2.265.925.000,00

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Realisasi koordinasi dengan instansi vertikal 2009, antara lain dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Musyawarah Pimpinan Daerah, antara lain dalam menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan, event-event nasional dan internasional, mengantisipasi ancaman bencana/terorisme.
- b. Rapat dengan Pimpinan Instansi Vertikal terkait, antara lain pembebasan lahan Banjir Kanal, sterilisasi jalur busway dan memperlancar arus lalu lintas.
- c. Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Daerah lain dan Kementrian terkait dalam rangka memenuhi undangan DPR guna mengantisipasi kemungkinan bencana banjir di Ibukota dan sekitarnya.

- d. Koordinasi dengan Kementrian Keuangan dalam rangka kelancaran pemungutan pajak pusat yang ada di daerah.
- e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bencana yang intensitas/frekuensinya cukup tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Kebakaran

Pada tahun 2009 terjadi 818 kasus kebakaran dengan kerugian sekitar Rp 213 miliar, korban jiwa 13 orang meninggal dan 55 orang luka-luka, meliputi kebakaran pada bangunan perumahan 3.260 unit, bangunan umum 624 unit, bangunan industri 26 unit, kendaraan 72 unit dan lain-lain sebanyak 214 unit.

Penyebab kebakaran sebagian besar dari arus pendek listrik yaitu 475 kasus, kompor meledak 82 kasus, akibat rokok 49 kasus, akibat lampu 20 kasus dan akibat lainnya 193 kasus.

Realisasi upaya pencegahan antara lain:

- a. Kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- b. Pemeriksaan dan pengawasan bangunan dan lingkungan termasuk akses mobil pemadam kebakaran, sumber air dan tempat berkumpul untuk kepentingan rencana operasional kebakaran.
- c. Pelayanan teknis pencegahan kebakaran kepada masyarakat.
- d. Pembinaan teknis terhadap kegiatan pendataan bangunan dan lingkungan.
- e. Sosialisasi pengamanan rumah, gedung dan bangunan dari bahaya kebakaran.
- f. Pelatihan dan simulasi penyelamatan jika terjadi kebakaran bagi masyarakat maupun pengguna gedung perkantoran.
- g. Pemeriksaan dan pengawasan secara berkala bangunan dan atau lingkungan terhadap potensi kebakaran, sarana keselamatan jiwa,

kesiapan sarana pencegahan kebakaran, aksesibilitas petugas pemadam kebakaran dan sistem pengamanan kebakaran.

- h. Pengawasan dan pengendalian tata cara menyimpan dan menggunakan serta mengangkut barang mudah terbakar dan Bahan-Bahan Berbahaya (B3).
- i. Penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan penanggulangan.
- j. Sosialisasi Perda Nomor 8 tahun 2008

2. Banjir

Jakarta merupakan daerah rawan banjir, baik banjir tahunan maupun banjir lima tahunan. Realisasi upaya pencegahan, antara lain :

a. Upaya struktural berupa :

- Kanal Banjir Timur
- Pengerukan kali / saluran / drainase
- Normalisasi Kanal Banjir Barat
- Sumur resapan

b. Upaya non structural berupa :

- Sosialisasi pemeliharaan kebersihan lingkungan.
- Kerja bakti kebersihan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat.
- Membangun dan memfungsikan sistem peringatan dini dengan memanfaatkan fungsi pintu air sebagai indikator tingkat kesiagaan banjir, seperti pintu air Katulampa, Depok dan Manggarai.
- Penyiapan tempat-tempat pengungsian pada setiap kelurahan, termasuk penyiapan dapur umum.
- Koordinasi dan siaga banjir lintas sektoral.

BAB VII

PENUTUP

Sebagai Penutup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2009, diharapkan materi LKPJ Tahun 2009 dapat menjadi bahan pembahasan DPRD untuk merumuskan rekomendasi DPRD, yang akan berguna dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa-masa mendatang.

Secara substansi LKPJ Tahun 2009 adalah *progress report* pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta permasalahan dan solusinya.

Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, terdapat beberapa keberhasilan pembangunan yang dicapai selama tahun 2009. Namun demikian dibalik keberhasilan tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, masih perlu upaya-upaya nyata agar keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai lebih optimal.

Demikian, LKPJ ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan ridha-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk menyelesaikan tugas mulia dalam membangun kota Jakarta tercinta.

LAMPIRAN

**Tabel 1. Matriks Indikator Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2006-2009**

Deskripsi	2006	2007	2008	2009
EKONOMI				
1. PDRB-Harga Berlaku (Triliun Rp.)	501,57	566,45	677,41	757,02
2. PDRB – Harga Konstan 2000 (Triliun Rp.)	312,68	332,97	353,54	369,98
3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,90	6,44	6,22	5,01
4. PDRB Per Kapita				
a. Dalam Jutaan Rupiah	55,98	62,49	74,20	82,08
b. Dalam US\$	6.206	6.917	7.756	8.920
5. Struktur Ekonomi (%)				
a. Pertanian & Pertambangan	0,58	0,57	0,58	0,51
b. Industri, Listrik & Air	28,17	28,28	28,14	28,21
c. Perdagangan & Jasa	71,25	71,15	71,28	71,28
6. Tingkat Inflasi (%)	6,03	6,04	11,11	2,34
7. Kurs Rp Terhadap US\$	9.020	9.136	9.544	10.398
8. Jumlah Wisman (Juta Orang)	1,22	1,22	1,53	1,45
9. Total APBD (Trilyun Rp.)	17,99	17.09	20.59	20.98
10. Jumlah Penduduk Bekerja (Juta Orang)	3,53	3,54	4,05	4,19

Deskripsi	2006	2007	2008	2009
INVESTASI				
1. Kebutuhan Pembentukan Modal (investasi) Total – Harga Berlaku (trilyun Rp)	179,30	212.34	242.47	263.47
2. Kebutuhan Pembentukan Modal (investasi) Total – Harga Konstan (trilyun Rp)	105,30	112.33	121.87	125.23
3. ICOR	4,8	4,4	5,2	5,3
4. Kemampuan Investasi Pemda DKI Jakarta (Trilyun Rp)	7,45	7,93	8,5	9,1
5. Peranan Investasi Pemda DKI Jakarta Terhadap Investasi Total	4,16	3,8	3,5	3,7

**Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Menurut Sektor
Tahun 2006-2009**

Deskripsi	2006	2007	2008	2009
1. Pertanian	1,13	1,55	0,77	0,34
2. Pertambangan	1,87	0,46	0,32	-4,34
3. Industri Pengolahan	4,97	4,60	3,87	0,14
4. Listrik, Gas & Air Bersih	4,99	5,20	6,32	4,58
5. Bangunan	7,12	7,81	7,67	6,20
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,47	6,88	6,66	4,01
7. Pengangkutan & Komunikasi	14,36	15,25	14,83	15,63
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,82	4,47	4,21	3,97
9. Jasa-jasa	5,56	6,08	6,05	6,49
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	5,95	6,44	6,22	5,01
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI tanpa MIGAS	5,96	6,46	6,24	5,03

**Tabel 3. Matrik Indikator Makro Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2006-2009**

Deskripsi	2006	2007	2008	2009
SOSIAL				
1. Jumlah Penduduk (Juta Orang)	8,96	9,06	9,15	9,22
2. Jumlah Angkatan Kerja (Juta Orang)	4,12	4,09	4,56	4,76
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	14,31	12,57	12,16	12,15
4. Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	407,1	405,7	379,6	323,20
5. Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)	4,6	4,5	4,29	3,62
6. Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita	1,53	1,55	1,54	1,52
7. Angka Kematian Bayi (IMR)	14,0	8,40	8,2	8,1
8. Angka Harapan Hidup (e_0)	74,14	75,80	75,9	76
9. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,10	11,16	11,56	11,77
10. Angka Melek Huruf (%)	98,34	98,83	98,76	98,84
11. Angka Partisipasi Sekolah				
a. 7 - 12 Tahun	98,46	98,73	98,99	98,93
b. 13 - 15 Tahun	90,16	90,36	90,38	91,04
c. 16 - 18 Tahun	60,26	61,05	61,23	65,17